

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) 2019 KOTA BANDA ACEH



TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TKPK) KOTA BANDA ACEH



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua, Salawat dan Salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat beliau sekalian, sehingga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2019 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) merupakan laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi dan TKPK Kabupaten / Kota, yang diatur dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

Penyiapan dan penyusunan laporan ini merupakan tugas dan fungsi TKP2K Provinsi dan TKPK Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010, Pasal 9 dan Pasal 11.

Laporan LP2KD ini merupakan hasil sinkronisasi dan koordinasi TKPK Kota Banda Aceh yang melibatkan instansi terkait, baik lembaga yang bersifat horizontal maupun vertikal. Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan Kota Banda Aceh dan sekaligus upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota serta menjadi panduan Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak-pihak lain yang ingin bersama-sama membangun kota ini menjadi lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan ini masih terdapat kekurangan, dari sisi penyajian data dan struktur bahasa. Karena itu, kami berharap kritikan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang menjadi lebih baik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, seraya berharap buku ini benar-benar dapat memberikan gambaran dan informasi tentang kemiskinan Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Desember 2019

WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
Sebagai Ketua TKPK Kota Banda Aceh



Drs. H. ZAINAL ARIFIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II – PROFIL KEMISKINAN DAERAH	8
2.1. Kondisi Umum Daerah	8
2.2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi	9
2.2.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan	11
2.2.1.1. Dimensi Ekonomi	11
2.2.1.2. Dimensi Ketenagakerjaan	18
2.2.2. Dimensi Pendidikan	21
2.2.3. Dimensi Kesehatan	27
2.2.4. Dimensi Prasarana Dasar	31
2.2.4.1. Akses Air Minum Layak	32
2.2.4.2. Akses Sanitasi Layak	34
2.2.4.3. Akses Listrik	34
2.2.5. Dimensi Ketahanan Pangan	35
BAB III – KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	38
3.1. Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan	38
3.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	42
3.2.1. Klaster 1	42
3.2.2. Klaster 2	45
3.2.3. Klaster 3	46
3.2.4. Klaster 4	47
3.3. Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan	50
3.3.1. Analisis Pendapatan Daerah	50
3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53
3.3.1.2. Dana Perimbangan	54

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55
BAB IV – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	57
4.1. Kelembagaan TKPK	57
4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	61
4.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	62
4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	62
4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat	66
4.3.2.1. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh	66
4.3.2.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh	67
BAB V – PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Rekomendasi	74
LAMPIRAN I LAMPIRAN 1. EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2019	
LAMPIRAN II FOTO RAPAT TKPK TAHUN 2019	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	8
Tabel 2.2	Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh	10
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2015 s/d 2018	13
Tabel 2.4	Fasilitas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2016 – 2018	23
Tabel 2.5	Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2018	32
Tabel 2.6	Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018	36
Tabel 3.1	Klaster 1 Program perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Rumah Tangga Tahun 2019	43
Tabel 3.2	Klaster 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas	46
Tabel 3.3	Klaster 3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil	46
Tabel 3.4	Klaster 4 Program Pembangunan Pro-Rakyat	48
Tabel 4.1	Rekap Anggaran Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Per Klaster Tahun 2019	63
Tabel 4.2	Rekapan Evaluasi Per OPD Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019	63
Tabel 4.3	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per OPD Tahun 2019	65
Tabel 4.4	Jumlah Penerima BPNT Kota Banda Aceh Tahun 2019	68
Tabel 4.5	Rekapitulas Penyelesaian Program BPNT Tahun 2019	69
Tabel 4.6	Jumlah Pengaduan SLRT Tahun 2019	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2015 s/d 2018	14
Gambar 2.2	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh Tahun 2018	15
Gambar 2.3	Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018	16
Gambar 2.4	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2018	16
Gambar 2.5	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2018	17
Gambar 2.6	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2018	18
Gambar 2.7	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Tahun 2018	19
Gambar 2.8	Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014 – 2018	19
Gambar 2.9	Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014 – 2018 ..	21
Gambar 2.10	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018	22
Gambar 2.11	Analisis Relevansi APM SMA/Sederajat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2018	24
Gambar 2.12	Perkembangan Antar Waktu APM/Sederajat Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2018	25
Gambar 2.13	Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah / Tahun (HLS) di Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2018	25
Gambar 2.14	Persentase Siswa Tingkat Menengah yang mampu membaca Al-Quran Tahun 2013 – 2017	26
Gambar 2.15	Angka Kematian Bayi di Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018	28
Gambar 2.16	Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018	29
Gambar 2.17	Cakupan K1 Dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018	30

Gambar 2.18	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas di Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018	31
Gambar 2.19	Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2013 – 2018	33
Gambar 2.20	Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2014 - 2018	34
Gambar 2.21	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2014 - 2018	35
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018	52
Gambar 3.2	Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018	54
Gambar 3.3	Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018	55
Gambar 3.4	Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dan Kontribusinya Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di seluruh dunia terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat, khususnya di kota-kota besar, Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial. Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, salah satunya yaitu kemiskinan.

Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Kemiskinan berkaitan pula dengan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi.

Besarnya dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, menjadikan masalah tersebut sebagai isu global dan bahkan ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Begitu pentingnya masalah kemiskinan sehingga penanggulangannya menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh dunia baik oleh lembaga pemerintahan, dunia usaha, LSM, serta berbagai pihak terkait lainnya.

Di Indonesia sendiri, penanganan masalah kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah. Isu-isu strategis kemiskinan tersebut dituangkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun perencanaan tahunan agar seluruh upaya penanggulangan berjalan secara terarah dan terintegrasi. Banda Aceh dalam hal ini adalah salah satu daerah yang memberikan perhatian khusus terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah.

Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kota Banda Aceh sesuai RPJMD tahun 2017 – 2022 memiliki Visi “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah”, dengan 7 Misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Meskipun strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada misi ke-3, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata Dan Kesejahteraan Masyarakat”, namun secara tidak langsung juga di dukung oleh 6 misi lainnya. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur yang layak bagi seluruh kelompok masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan anak, turut memberikan dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Selain itu, berbagai program Syariat Islam juga dilaksanakan secara intensif di Kota Banda Aceh yang diharapkan dapat memperkuat mental dan mendorong peningkatan zakat bagi masyarakat miskin.

Adapun hal yang menjadi perhatian didalam proses penanganan masalah kemiskinan di Kota Banda Aceh salah satunya adalah fungsinya sebagai Ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat berbagai aktivitas seperti perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan telah mendorong tingginya tingkat kunjungan ke kota Banda Aceh yang mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin tinggi. Selain itu pertumbuhan tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik juga lebih tinggi dari lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya angka pengangguran pada usia produktif menjadi

tinggi yang kemudian berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang meningkat tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana bagi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan khususnya untuk warga yang kurang mampu. Pemerintah Kota Banda Aceh juga harus menyusun berbagai program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Isu lainnya adalah meningkatkan sinkronisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, baik yang bersumber dari dana pusat, provinsi, daerah, maupun sumber-sumber lainnya seperti pihak swasta dan LSM. Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM juga membutuhkan perhatian khususnya terkait akses terhadap pengadaan modal usaha, pemasaran, serta keterampilan dan penerapan teknologi yang masih minim.

Selanjutnya pendampingan dan sosialisasi kepada OPD terkait juga masih perlu dilakukan agar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan memberikan hasil. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan memperhatikan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (by name, by address) untuk memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya.

Peran dan Fungsi TKPK di Daerah

Guna meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin kedua menyebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini membutuhkan berbagai pendekatan dari seluruh aspek terkait. TKPK memastikan agar seluruh kegiatan penanggulangan di daerah dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh OPD dan instansi terkait lainnya sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat tercapai sesuai target. Dokumen ini akan menyampaikan secara menyeluruh profil kemiskinan di Kota Banda Aceh, berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut termasuk kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh Tahun 2019 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penyusunan LP2KD Kota Banda Aceh tahun 2019 adalah :

- a. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2019.
- b. Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPK Kota Banda Aceh dalam melaksanakan koordinasi, kebijakan baik itu program, anggaran dan

regulasi serta pencapaian penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh tahun 2019.

- c. Menjelaskan setiap pencapaian yang telah dicapai oleh daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan.

1.3 Landasan Hukum

Dasar penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Banda Aceh antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Sebagai Arah Implementasi Program-Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Qanun Walikota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022;

13. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika LP2KD adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I – PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II – PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Kondisi Kemiskinan Multidimensi
 - 2.2.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan
 - 2.2.2. Dimensi Pendidikan
 - 2.2.3. Dimensi Kesehatan
 - 2.2.4. Dimensi Prasarana Dasar
 - 2.2.5. Dimensi Ketahanan Pangan

BAB III – KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 3.1. Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan
- 3.2. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
- 3.3. Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan
 - 3.3.1. Analisis Pendapatan Daerah

BAB IV – KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 4.1. Kelembagaan TKPK
- 4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- 4.3. Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan
 - 4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
 - 4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB V – PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BAB II

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi Aceh berada di posisi paling barat Pulau Sumatera. Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dan berada dibelahan bumi bagian utara. Tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Selat Malaka
Sebelah Selatan	: Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil Digitasi GIS Citra Satelit pada tahun 2015, luas kota Banda Aceh adalah 59,002 km² dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1	Meuraxa	8,459	14,34%
2	Baiturrahman	4,142	7,02%
3	Kuta Alam	9,587	16,25%
4	Syiah Kuala	13,591	23,03%
5	Ulee Kareng	5,182	8,78%
6	Banda Raya	4,949	8,39%
7	Kuta Raja	3,889	6,59%
8	Lueng Bata	4,445	7,53%
9	Jaya Baru	4,759	8,07%
	Jumlah	59,002	100,00%

Sumber: Hasil Digitasi GIS, Citra Satelit Tahun 2015

Kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 *gampong* (desa). Jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah sebanyak 265.111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,00 persen dan rata-rata kepadatan penduduk 4.321 jiwa/km².

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, keberhasilan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama dalam melaksanakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

2.2 Kondisi Kemiskinan Multidimensi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku Kota Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019, terjadi penurunan persentase tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2013-2016 yaitu 8,03 persen pada tahun 2013 menjadi 7,41 persen di tahun 2016, tetapi pada tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan menjadi 7,44 persen, namun di tahun 2018 turun menjadi 7,25 persen. Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berupaya untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ini. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan adalah menetapkan kriteria kemiskinan yang merupakan penyesuaian antara indikator nasional dan lokal yang disusun di tahun 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59. Kriteria penduduk miskin Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kriteria Penduduk Miskin Kota Banda Aceh

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
1	Pendapatan perkapita	Lebih kecil atau sama dengan Rp. 400.000,-	Lebih besar dari Rp. 400.000,- dan lebih kecil dari Rp. 625.000,-
2	Frekuensi membeli daging / ayam dalam sebulan	Tidak pernah membeli / hanya satu kali dalam sebulan	Hanya membeli satu kali dalam sebulan
3	Kemampuan membeli pakaian baru selama 1 (satu) tahun	satu stel	dua stel
4	Kemampuan berobat	Fasilitas kelas III	Fasilitas kelas III
5	Kondisi Kesehatan batita	Gizi buruk / kurang	Gizi buruk / kurang
6	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala keluarga	Maksimal tamatan SMP dan setara	Tamatan SMA dan setara
7	Kemampuan menyekolahkan anak (usia 7 - 15 tahun)	Tamat SMP / Setara	Tamat SMP/ Setara
8	Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga	Tidak ada	Memiliki pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok
9	Memiliki tabungan dalam bentuk uang atau barang	Tidak memiliki harta dan tabungan	Memiliki harta / tabungan senilai lebih kecil dari Rp.4.000.000,-
10	Luas lantai tempat tinggal	Kurang dari 8m ² per kapita	8m ² per kapita

No	Kriteria Lokal	Klasifikasi	
		Fakir	Miskin
11	Jenis lantai bangunan	Semen kasar / kayu kualitas rendah	Semen halus / keramik kualitas rendah
12	Jenis dinding rumah	Bukan dinding beton / kayu kualitas rendah	Dinding beton kualitas rendah atau tanpa plester
13	Sumber air bersih	Sumur	Sumur / PDAM
14	Sumber penerangan utama	PLN (2A)	PLN (4 A)
15	Fasilitas tempat buang air besar	MCK tidak layak/komunal	MCK tidak layak / komunal

Ketentuan :

Jika sudah memenuhi 10 kriteria dari 15 kriteria miskin yang ada maka dapat menerima bantuan baik fakir maupun miskin

2.2.1 Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

2.2.1.1 Dimensi Ekonomi

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai nominal rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Dalam ajaran Islam, tugas mengentaskan kemiskinan merupakan kewajiban setiap individu, masyarakat dan pemerintah. Menghadapi persoalan sosial ini, Al-Quran menawarkan beberapa prinsip

dalam pemberdayaan kaum fakir dan miskin (Rodin,2015). Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ **Pertama, prinsip tāwūn**, yakni prinsip kerjasama dan sinergi diantara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:
“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Ma’idah [5]:2)
- ❖ **Kedua, prinsip syūrā**, yakni prinsip musyawarah diantara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan).
- ❖ **Ketiga, model pemberdayaan**, yang mana bisa bersifat struktural (lembaga khusus) dan kultural (individu). Sehingga sangat diperlukan peranan pemerintah dalam menjalankan model pemberdayaan fakir miskin.

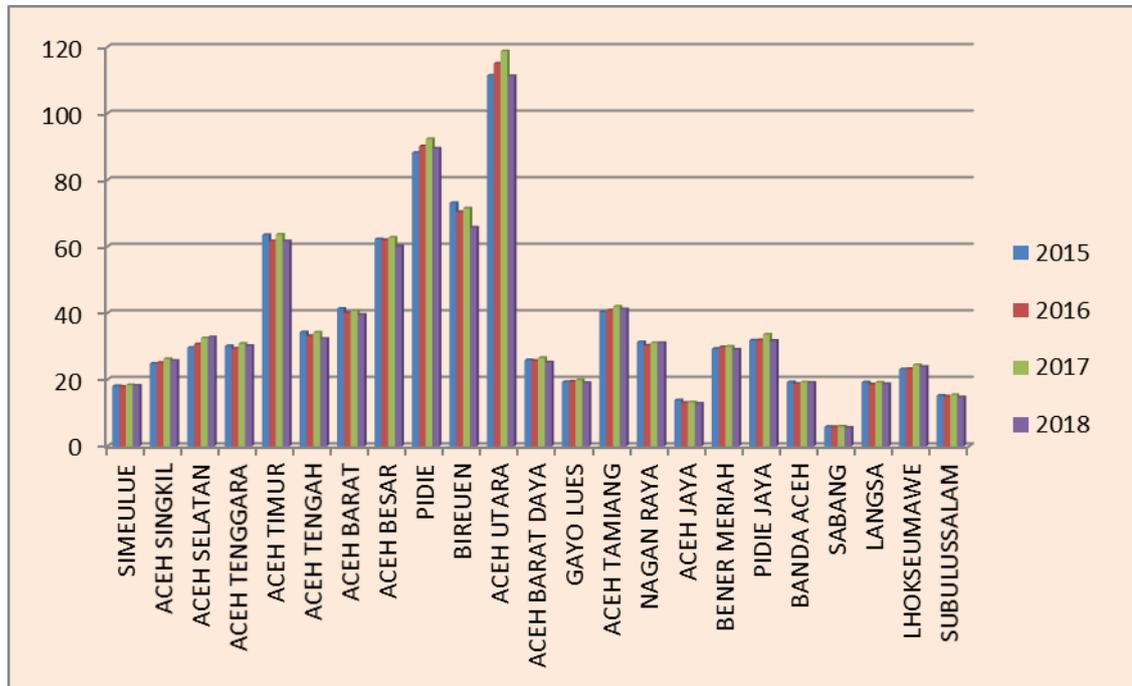
Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan ketiga metode ini dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Output atau hasil kerja selama ini telah menunjukkan hasil yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Metode ini masih terus diterapkan di Banda Aceh sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan secara konsisten. Jumlah penduduk miskin dalam Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2015 – 2018

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
	2015	2016	2017	2018
	Maret	Maret	September	September
SIMEULUE	18.12	17.93	18.40	18.22
ACEH SINGKIL	24.84	25.09	26.27	25.73
ACEH SELATAN	29.61	30.68	32.51	32.81
ACEH TENGGARA	30.14	29.39	30.84	30.20
ACEH TIMUR	63.48	61.63	63.67	61.64
ACEH TENGAH	34.26	33.16	34.24	32.31
ACEH BARAT	41.36	40.11	40.72	39.56
ACEH BESAR	62.27	62.03	62.72	60.08
PIDIE	88.22	90.16	92.35	89.53
BIREUEN	73.14	70.44	71.54	65.74
ACEH UTARA	111.44	115.05	118.74	111.27
ACEH BARAT DAYA	25.93	25.73	26.57	25.22
GAYO LUES	19.32	19.48	19.91	19.08
ACEH TAMIANG	40.38	40.88	42.01	41.20
NAGAN RAYA	31.32	30.31	31.06	31.05
ACEH JAYA	13.85	13.1	13.23	12.84
BENER MERIAH	29.31	29.82	29.99	29.07
PIDIE JAYA	31.81	31.94	33.60	31.72
BANDA ACEH	19.3	18.8	19.23	19.13
SABANG	5.86	5.81	5.98	5.61
LANGSA	19.22	18.63	19.20	18.73
LHOKSEUMAWE	23.15	23.28	24.40	23.87
SUBULUSSALAM	15.25	14.99	15.44	14.77
ACEH	851.59	848.44	829.80	839.48

Tabel 2.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah Provinsi Aceh dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2018. Adapun interval/jarak waktu pada setiap kolom adalah per Maret dan September setiap tahunnya. Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Aceh selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Perkembangan Penduduk Miskin dalam Provinsi Aceh Tahun 2015 s/d 2018

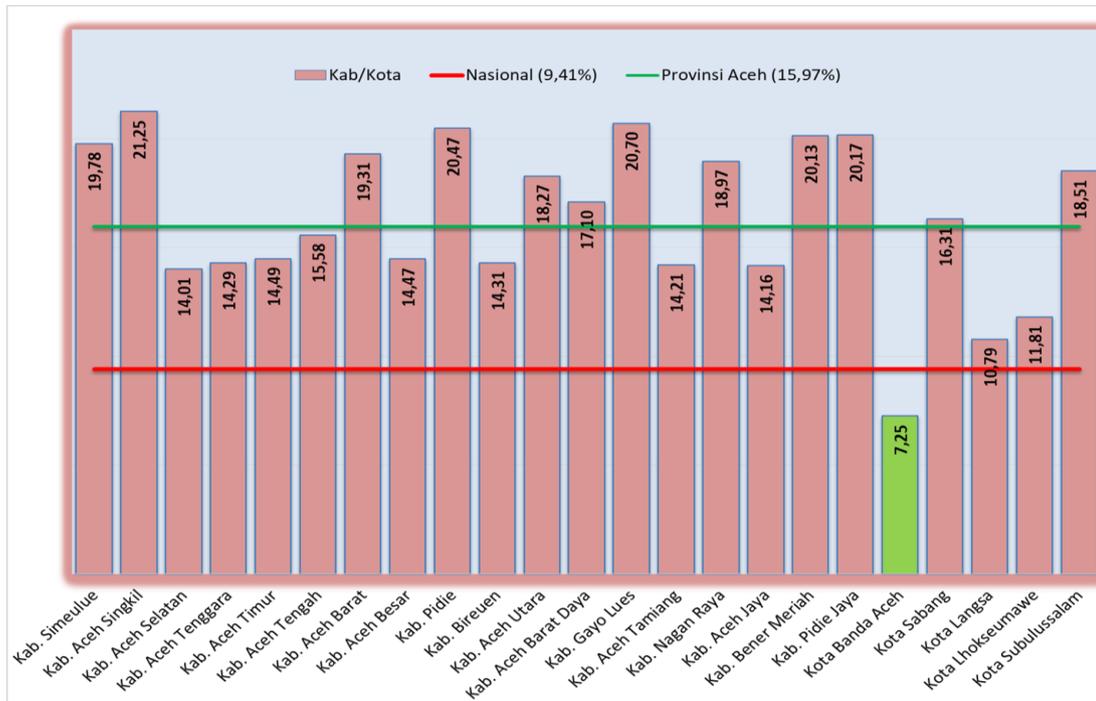


Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar diatas mendeskripsikan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama empat tahun terakhir mulai dari 2015 hingga 2018 bersifat cenderung fluktuatif (naik-turun). Dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 19.3 (ribu jiwa), pada tahun 2016 turun cukup signifikan hingga mencapai 18.8 (ribu jiwa). Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di lingkungan Kota Banda Aceh meningkat hingga 19.23 (ribu jiwa) dan kembali berkurang hingga berada pada posisi 19.13 (ribu jiwa) di tahun 2018.

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh tahun 2018 dibandingkan dengan kabupaten/kota di Aceh, provinsi Aceh dan Nasional secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Banda Aceh Tahun 2018



Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas terlihat bahwa posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh tahun 2018 yaitu sebesar 7,25 persen merupakan angka terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Angka tersebut masih berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Aceh sebesar 15,97 persen dan nasional sebesar 9,41 persen.

Perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh selama lima tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2014 sebesar 7,78 persen menjadi 7,25 persen ditahun 2018. Hal ini secara teoritis dan statistis diakibatkan karena semakin rendah persentase penduduk miskin maka semakin lambat pula penurunan pada periode waktu berikutnya. Perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin kota Banda Aceh dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

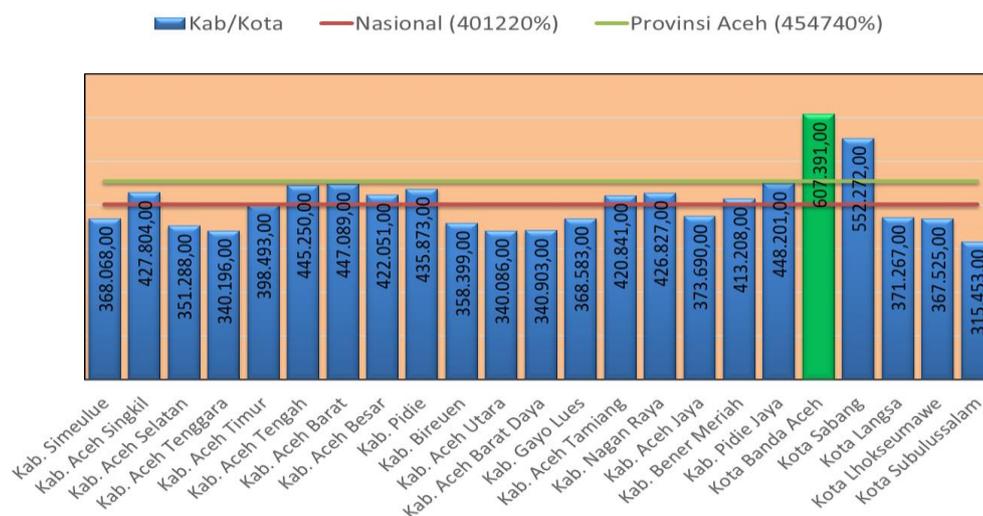
Gambar 2.3 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2015 – 2019

Adapun garis kemiskinan berdasarkan pendapatan perkapita/bulan pada tahun 2018 di Kota Banda Aceh menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu Rp. 607,391. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar Rp 454,740 dan nasional sebesar Rp 401.220. Hal ini dikarenakan standar harga barang di Kota Banda Aceh cenderung lebih mahal dari kabupaten/kota lain di Aceh, serta jumlah komoditas tersedia yang masuk dalam perhitungan garis kemiskinan lebih banyak terdapat di Kota Banda Aceh.

Gambar 2.4 Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Provinsi Aceh Tahun 2018

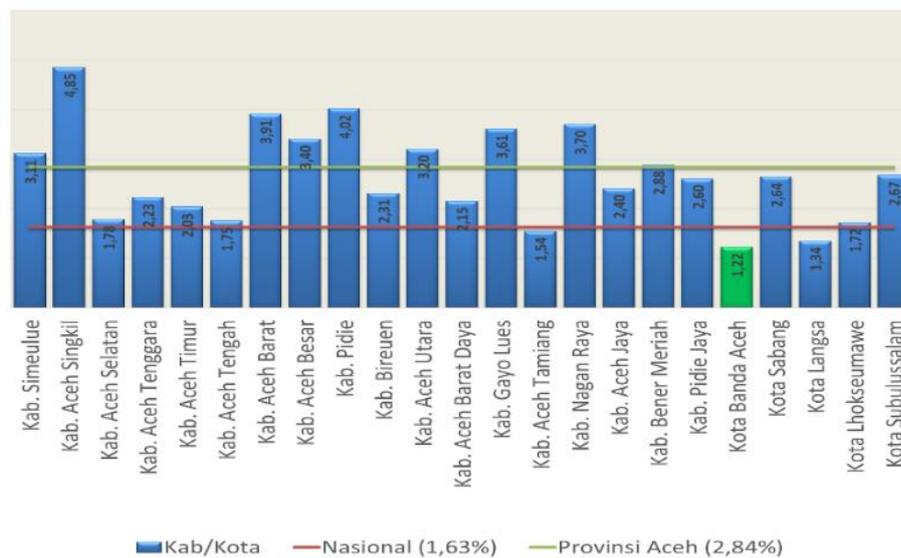


Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Data menunjukkan bahwa posisi relative P1 Kota Banda Aceh tahun 2018 adalah 1,22 lebih rendah dari Provinsi Aceh (2,84) dan nasional (1,63). Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh dengan Kabupaten/Kota lainnya di Aceh Tahun 2018 terlihat pada pada Gambar berikut.

Gambar 2.5 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Banda Aceh Tahun 2018

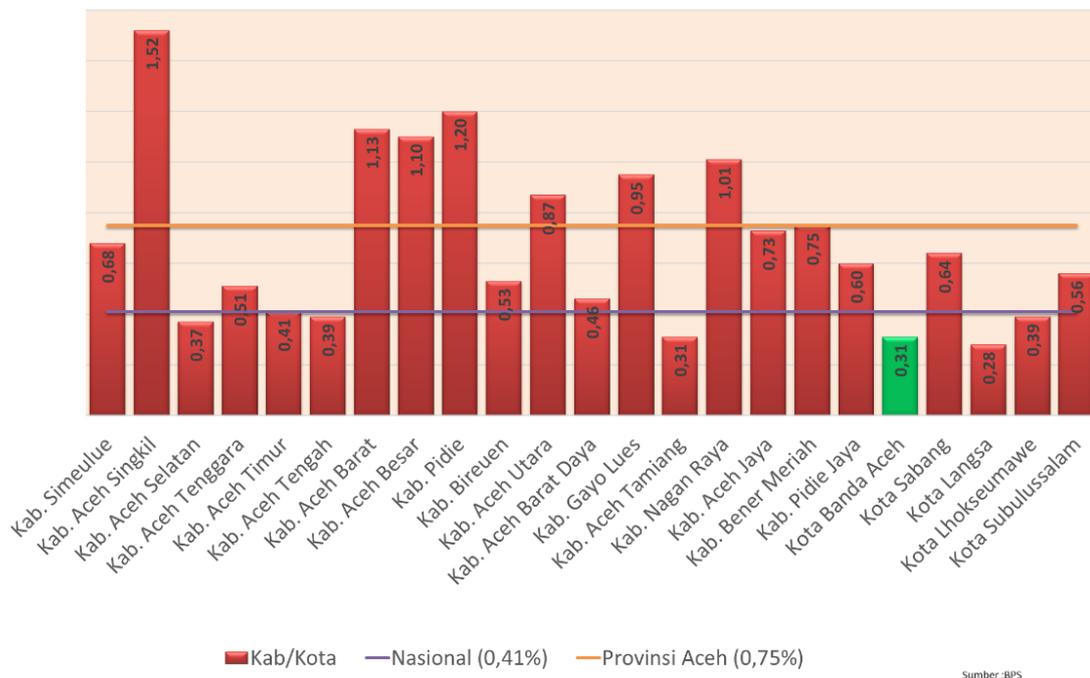


Sumber: BPS

Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Posisi relatif P2 Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sebesar 0,31, berbeda dengan P2 rata-rata nasional (0,41) dan lebih rendah dari Provinsi Aceh (0,75). Secara lengkap Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di provinsi Aceh Tahun 2018 disajikan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Banda Aceh Tahun 2018

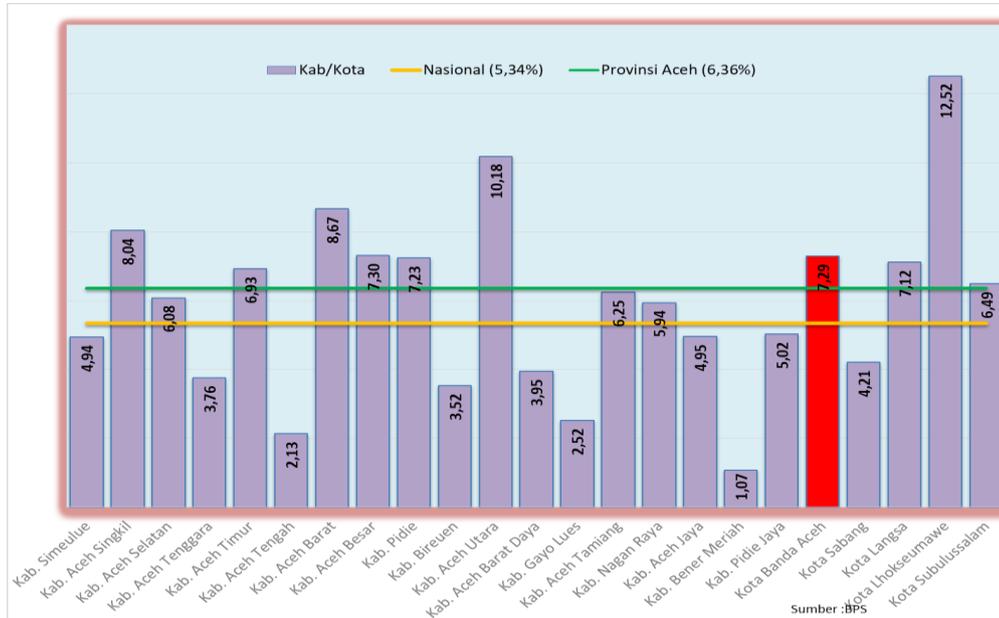


Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019

2.2.1.2 Dimensi Ketenagakerjaan

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Tahun 2018



Sumber : - Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019
 - Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2019

Pada tahun 2018 posisi relatif TPT Kota Banda Aceh adalah 7,29 persen berada diatas rata-rata Provinsi Aceh (6,36 persen) dan nasional (5,34 persen). Relevansi TPT Kota Banda Aceh terhadap Provinsi Aceh dan nasional tahun 2014-2018 disajikan pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kota Banda Aceh Terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014 - 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2015-2019

Keterangan: BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2016 (np: not published)

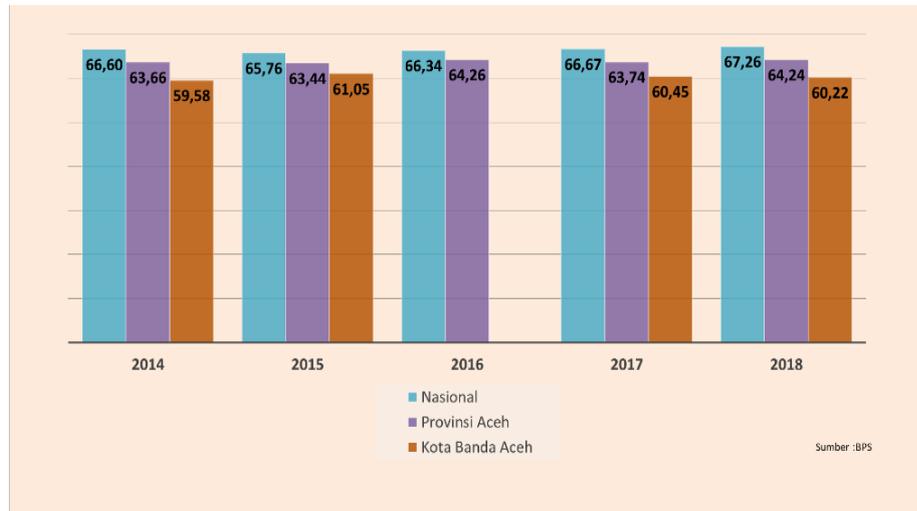
Dalam hal relevansi, dapat dilihat bahwa kecenderungan penurunan TPT di Kota Banda Aceh relevan dengan kecenderungan penurunan TPT di level Aceh maupun nasional. TPT di kota Banda Aceh mengalami penurunan dari 12,00 persen pada tahun 2015 menjadi 7,29 persen pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berada diatas persentase pengangguran Provinsi Aceh yang rata-rata 6,36 persen dan tingkat pengangguran rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.

Jumlah penduduk masuk ke kota Banda Aceh pada tahun 2014 sebesar 7,605 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 7,608 jiwa, yang menunjukkan terjadinya penambahan penduduk masuk pada kurun waktu tersebut. Sedangkan jumlah penduduk yang keluar dari Kota Banda Aceh pada tahun 2018 sebanyak 8,854 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa faktor migrasi penduduk ke Kota Banda Aceh bukanlah penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Banda Aceh, namun lebih disebabkan oleh kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja serta melambatnya perekonomian secara nasional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguran mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di Kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.

Perkembangan TPAK berfluktuatif baik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan nasional, namun TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhir selalu lebih rendah dari Provinsi Aceh dan nasional. Relevansi TPAK Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014 – 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2015-2019

Keterangan: BPS Kota Banda Aceh tidak menyediakan Data tahun 2016 (np: not published)

Dari segi relevansi maka kecenderungan penurunan TPAK di Kota Banda Aceh tidak relevan dengan kecenderungan kenaikan TPAK di level Aceh dan nasional. TPAK Kota Banda Aceh pada tahun 2018 (60,22 persen) mengalami penurunan dari tahun 2017 (60,45 persen), sedangkan TPAK Aceh dan nasional tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017.

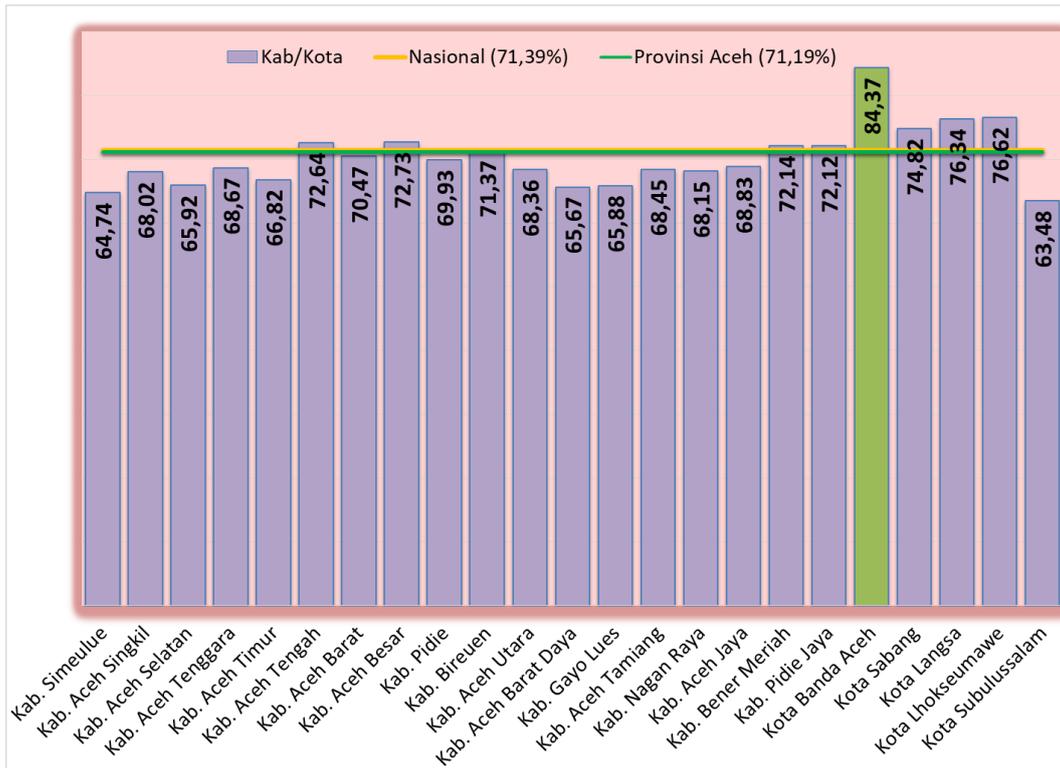
2.2.2 Dimensi Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu negara adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan.

Tingkat pendidikan di Kota Banda Aceh telah terlaksana cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM Kota Banda Aceh

yang mencapai angka 84,37 pada tahun 2018, lebih tinggi dari IPM Provinsi Aceh yang hanya mencapai angka 71,19. Perbandingan IPM kabupaten/kota di Aceh tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Aceh Aceh 2019

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat menunjang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Berdasarkan catatan dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ajaran 2017/2018, terjadi peningkatan jumlah sekolah TK sebanyak 9 unit, Sedangkan SD dan SMK tidak ada penambahan. Fasilitas pendidikan di Kota Banda Aceh dari tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Fasilitas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2016 - 2018

Uraian	2016	2017	2018
SEKOLAH			
TK	85	95	104
SD/MI	84	85	85
SMP/MTs	32	32	32
SMA/MA	29	28	30
SMK	8	10	10
MURID			
TK	7 645	8 321	902
SD/MI	22 827	23 577	1 231
SMP/MTs	9 356	8 988	823
SMA/MA	9 236	9 245	9 446
SMK	3 425	4 237	4 237
GURU			
TK	758	902	8 321
SD/MI	1 225	1 258	23 577
SMP/MTs	855	869	8 985
SMA/MA	967	852	872
SMK	446	366	366

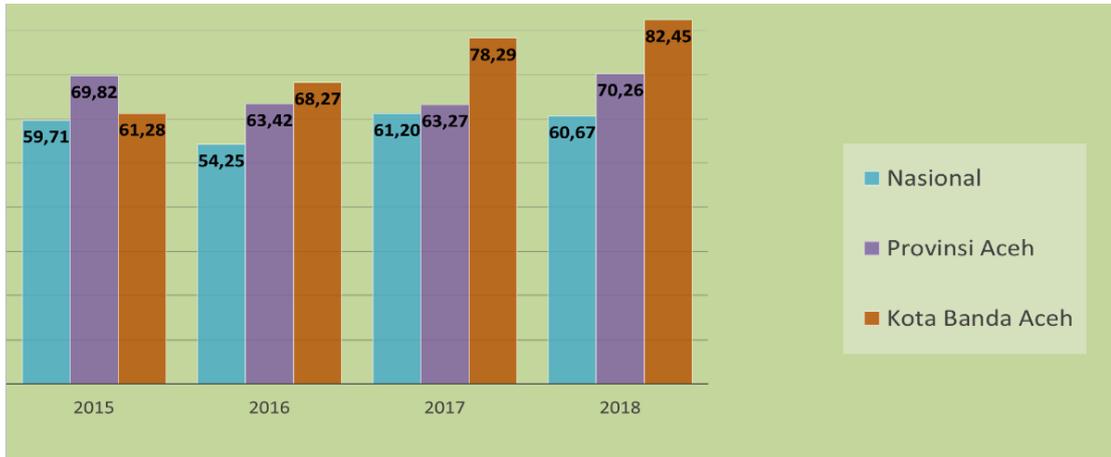
Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019

2.2.2.1 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Angka APM ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Pada tahun 2018 posisi relatif APM SMA/MA Kota Banda Aceh sebesar 82,45%, berada di atas rata-rata Provinsi Aceh (70,26%) dan APM

nasional (60,67%). APM SMA Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11 Analisis Relevansi APM SMA/Sederajat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2018



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, BPS Aceh dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017)

Kecenderungan APM SMA dan MA/SMK tidak mencapai 100 persen diakibatkan oleh masih adanya anak usia sekolah di kota Banda Aceh yang tidak melanjutkan lagi pada pendidikan formal setelah tamat SMP. Sebagian dari mereka lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan pada pesantren-pesantren atau dayah.

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan APM di tingkat SMA/Sederajat dan juga di tingkat lain di setiap jenjang pendidikan. Hal ini terjadi karena masih banyak orang tua yang cenderung lebih cepat memasukkan anaknya bersekolah pada tingkat dasar pada usia dibawah enam tahun sehingga berpengaruh pada APM masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan antar waktu APM SMA/Sederajat Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12 Perkembangan Antar Waktu APM SMA/Sederajat Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2018



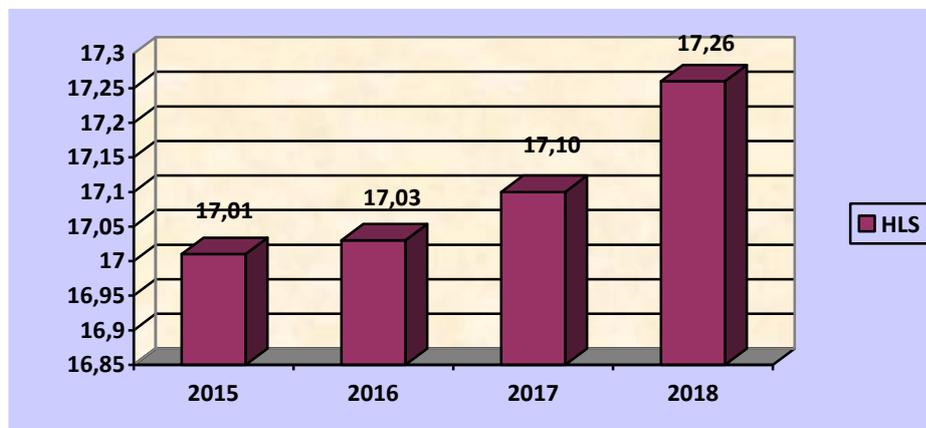
Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2019

APM SMA/Sederajat Banda Aceh juga menunjukkan besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.

2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan. Pada tahun 2018, angka harapan lama sekolah di Kota Banda Aceh mencapai 17,26 tahun artinya selama 18 tahun diharapkan penduduk usia 7 tahun keatas dapat merasakan pendidikan hingga tingkat sarjana. Angka HLS di Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Perkembangan Antar Waktu Harapan Lama Sekolah/ Tahun (HLS) di Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2018

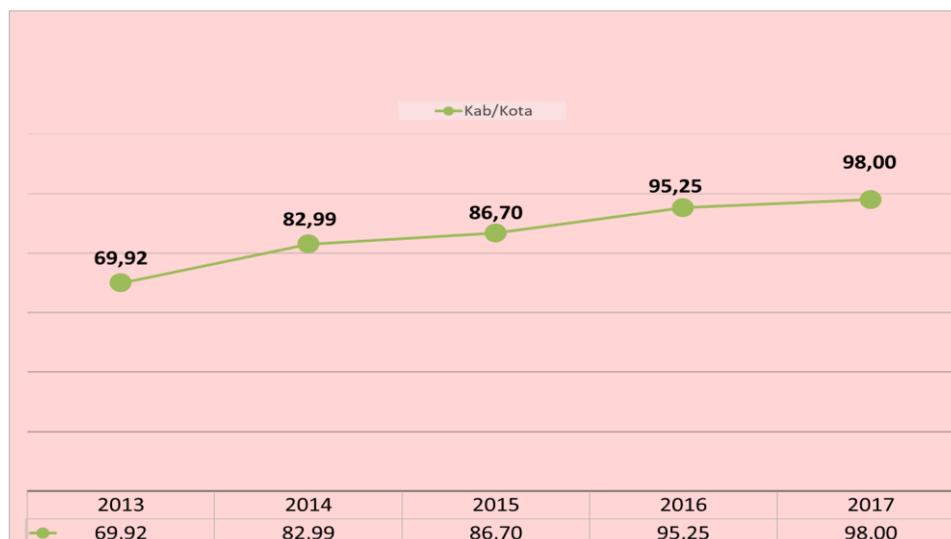


Sumber: Banda Aceh Dalam Angka 2019

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan Syariat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan kebijakan Pendidikan Diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Secara umum seluruh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis Islam melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial.

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui penerapan program diniyah pada sekolah menengah menargetkan peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an bagi siswa sekolah menengah. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, Banda Aceh mengukur kemampuan membaca Al-Quran siswa tingkat menengah dari jumlah siswa menengah yang mampu membaca Al Quran dibandingkan dengan jumlah total siswa tingkat menengah. Namun demikian, sejak adanya pergeseran wewenang pengelolaan sekolah tingkat menengah atas dari daerah ke level provinsi, maka sejak tahun 2018 Banda Aceh mengubah rumusan indikator kemampuan membaca Al Quran tersebut, dari jumlah siswa yang mampu membaca Al Quran, menjadi Siswa tingkat menengah pertama (Pendidikan dasar) yang mampu menghafal 2 Juz.

Gambar 2.14 Persentase Siswa Tingkat Menengah yang mampu membaca Al-Quran Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca Al Quran pada tingkat menengah atas. Sejak 2013 terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari hanya 69,92% siswa menengah atas yang mampu membaca Al Quran menjadi 98% di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2018 dan 2019, sesuai perubahan rumusan dan kewenangan, tercatat bahwa siswa menengah pertama yang menghafal 2 Juz juga mengalami peningkatan dari 93% menjadi 94%.

2.2.3 Dimensi Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyeluruh merupakan wujud nyata dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendukung visi dan misi Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan melalui program Gampong Sehat dan menggerakkan sektor kesehatan berdasarkan nilai-nilai Islami, mendorong kesadaran masyarakat untuk selalu menciptakan dan menerapkan pola hidup sehat, meningkatkan mutu kapasitas SDM kesehatan dan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat.

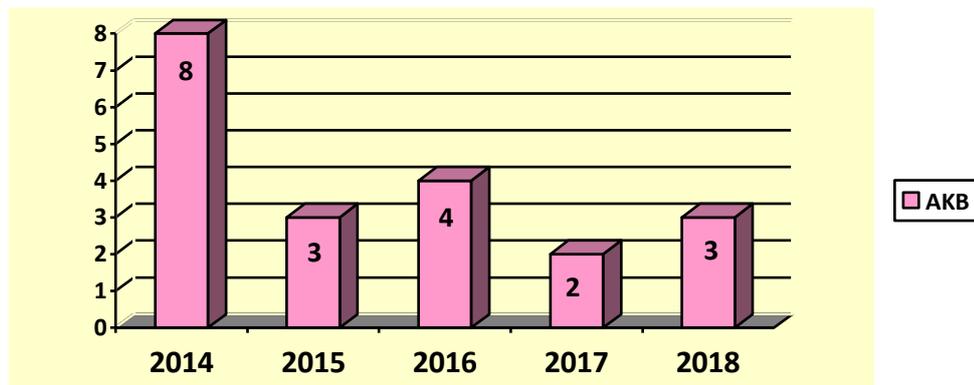
Peningkatan derajat kesehatan yang baik dalam masyarakat sangat erat hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan. Semakin kecil angka kemiskinan menunjukkan semakin baik sektor kesehatan. Beberapa indikator dibawah ini menunjukkan keterkaitan antara penanggulangan kemiskinan dan sektor kesehatan.

2.2.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) terutama SDG 4 Kesehatan dan Kesejahteraan. Indikator ini juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan di suatu daerah dan kualitas layanan fasilitas dan sumber daya kesehatan di suatu daerah.

Jumlah kematian bayi di Kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Menurunnya jumlah kematian bayi berkontribusi positif pada penurunan angka kematian bayi dari 8 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 3 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.15 Angka Kematian Bayi Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019

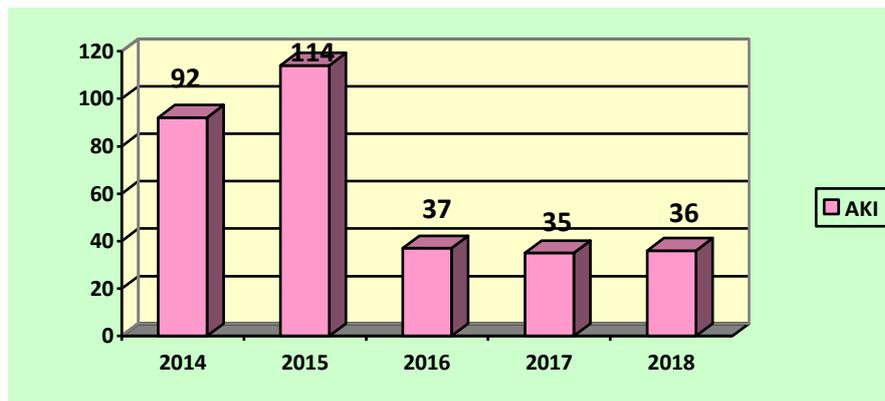
2.2.3.2 Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) termasuk salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilannya per 100.000 kelahiran hidup.

AKI di Kota Banda Aceh dari tahun 2014 - 2018 cenderung menurun. Jika pada tahun 2015 AKI lebih dari seratus per 100.000 kelahiran hidup,

maka AKI telah berhasil ditekan menjadi 37 pada tahun 2016, 35 pada tahun 2017 dan 36 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018.

Gambar 2.16 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019

2.2.3.3 Status Gizi Balita

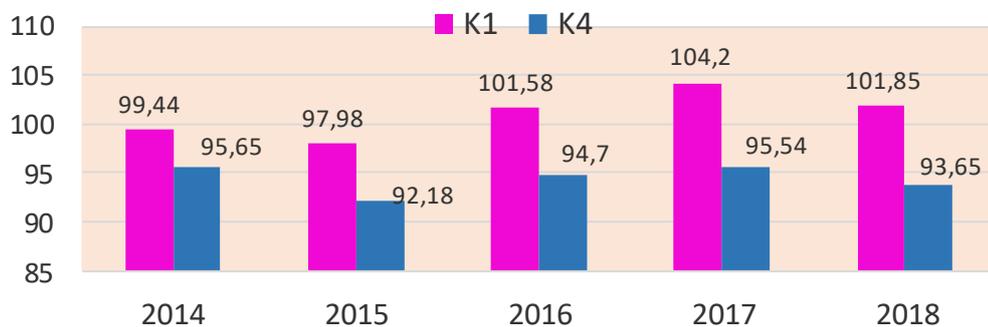
Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Berdasarkan penimbangan balita yang dilakukan selama tahun 2018, kasus balita gizi buruk hanya terdapat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuta Alam yaitu sebanyak 2 kasus.

2.2.3.4 Pelayanan Ibu Hamil K-1 dan K-4

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan dalam pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimum 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0 – 12 minggu), minimum 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12 - 24 minggu), dan 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 -36 minggu). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksa kehamilannya ke pelayanan kesehatan. Hasil pemantauan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dari Tahun 2014 – 2018 dimana K4 ibu hamil menurun tahun 2017 dibanding pada Tahun 2018. Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.17.

Gambar 2.17 Cakupan K1 dan K4 Ibu Hamil di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018



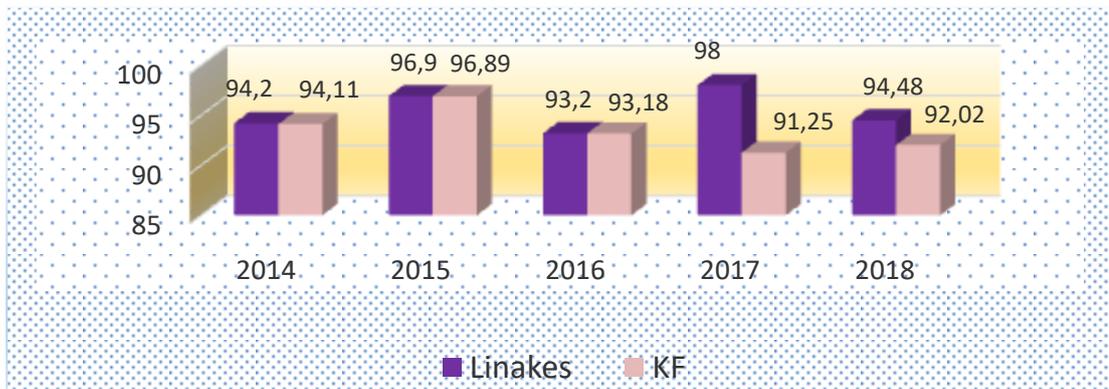
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019

2.2.3.5 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas dan sesuai standar. Kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Cakupan persalinan di Kota Banda Aceh pada tahun dari tahun 2014 - 2018 menunjukkan bahwa persentase pertolongan persalinan tenaga kesehatan mengalami peningkatan yaitu dari 94,2 % tahun 2014 menjadi 94,48 % pada tahun 2018. Pelayanan nifas di Kota Banda Aceh tahun 2014 sebesar 94,11% menurun menjadi 92,02% pada tahun 2018. Perbandingan antara pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kunjungan ibu nifas dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.18 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Kunjungan Nifas di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019

2.2.4 Dimensi Prasarana Dasar

Beberapa indikator dimensi prasarana dasar adalah akses air minum, akses sanitasi yang layak dan akses listrik. Indikator dan capaian dimensi prasana dasar pada tahun 2018 terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Indikator Dimensi Prasarana Dasar di Kota Banda Aceh (persen) Tahun 2018

No	INDIKATOR	Capaian Daerah (2018)
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	99,65%
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	90,62%
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	99,52%
4	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	76,73%
5	Proporsi Gampong dengan Jaringan Listrik	100%

2.2.4.1 Akses Air Minum Layak

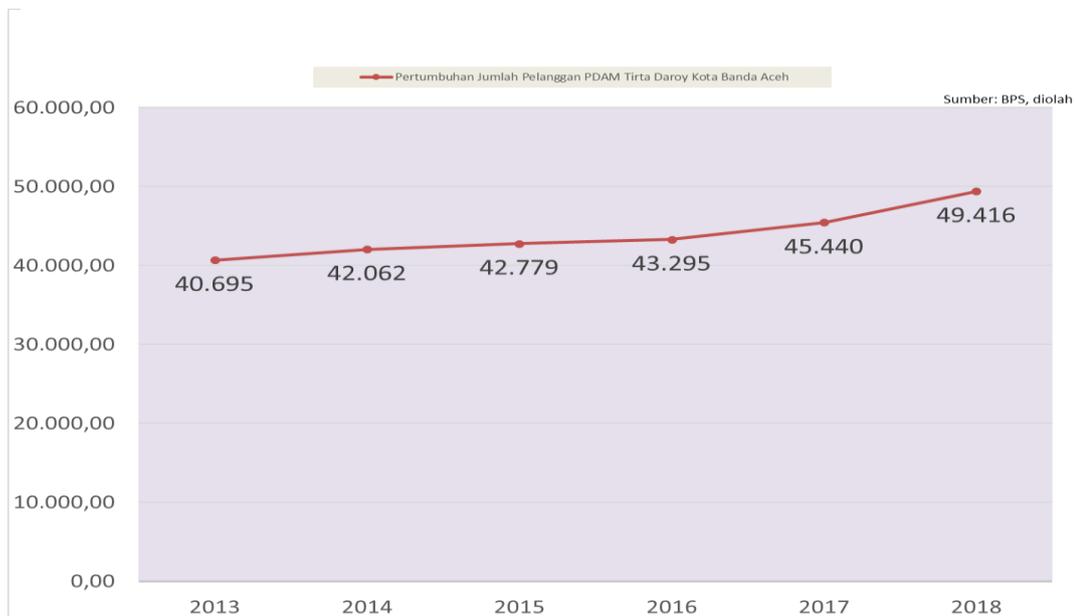
Dalam pelayanan air minum di Kota Banda Aceh saat ini belum tercapai secara optimal baik terhadap cakupan pelayanan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Hal ini disebabkan oleh terus terjadinya penambahan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan serta perdagangan dan jasa yang terus berkembang di Kota Banda Aceh. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pemasangan jaringan perpipaan dan prasarana pendukung lainnya terus ditingkatkan untuk mengejar pencapaian program 100 persen masyarakat terakses air minum di Tahun 2019. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan air minum telah mencapai 75,76 persen jumlah penduduk terlayani. (*asumsi 5 jiwa/SR berdasarkan : Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, Tahun 1996*).

Upaya-upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan cakupan pelayanan untuk pencapaian target 100 persen pelayanan di tahun 2019 dan pencapaian 4 K (Kualitas, Kwantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) dalam SPAM adalah program revitalisasi sistem distribusi dengan pembentukan zona pelayanan menjadi 4 wilayah serta pembangunan reservoir per zona layanan teknis. Hal ini dilakukan melalui manajemen pendistribusian air minum dengan metode pendistribusian berdasarkan kebutuhan (*management supply and demand*). Dengan terbentuknya sistem zonasi di wilayah pelayanan air minum diharapkan dapat mempermudah keterjangkauan akses

air minum serta dapat menurunkan tingkat kehilangan air yang saat ini mencapai 40 persen. Selain itu dilakukan juga manajemen tekanan air di sistem perpipaan yang selama ini masih bermasalah melalui pembentukan sub-sub zona atau District Meter Area (DMA) sebagai solusi pelayanan terhadap kualitas pelayanan dan penurunan tingkat kehilangan air oleh PDAM Tirta Daroy saat ini.

Permasalahan yang masih menjadi kendala dalam sistem penyediaan air minum di Kota Banda Aceh adalah sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh. Sementara itu kebutuhan air minum terus meningkat dan kualitas air baku yang makin lama semakin buruk terutama saat musim penghujan akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Krueng Aceh. Keterbatasan kapasitas unit Instalasi Produksi Air (IPA) juga menjadi permasalahan yang dihadapi karena meningkatnya permintaan akan pelayanan air minum. Pertumbuhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 2.19.

Gambar 2.19 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2013 - 2018

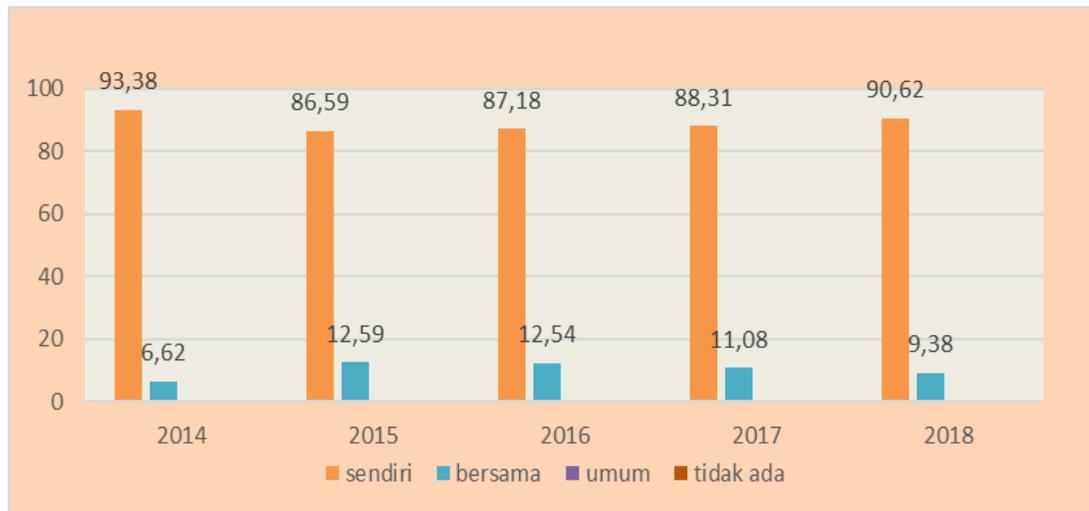


Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019

2.2.4.2 Akses Sanitasi Layak

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna peningkatan daya saing daerah harus didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2018 akses terhadap sanitasi rumah tangga di Kota Banda Aceh sudah mencapai 90,62 persen. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan sanitasi yang memenuhi persyaratan bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari respon masyarakat menerima bantuan program sanitasi dari pemerintah pusat/kota seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), Komunal, MCK ++ (Plus) di beberapa desa di Kota Banda Aceh. Rumah tangga berdasarkan fasilitas tempat buang air besar tahun 2014-2018 disajikan pada Gambar 2.20.

Gambar 2.20 Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Banda Aceh (persen), 2014 - 2018



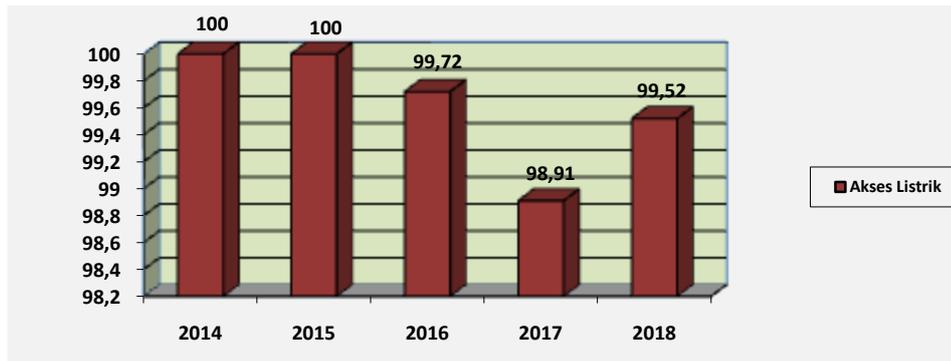
Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2019

2.2.4.3 Akses Listrik

Sampai saat ini pasokan listrik untuk Kota Banda Aceh masih bergantung dari Sumatera Utara. Oleh karena itu listrik di Kota Banda Aceh masih sangat sering mengalami gangguan atau pemadaman sehingga persentase rumah tangga dengan akses listrik yang berasal dari PT.PLN di

Kota Banda Aceh belum stabil. Gambar 2.21 berikut menggambarkan perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki akses listrik.

Gambar 2.21 Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kota Banda Aceh (persen), 2014 - 2018



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga dengan akses listrik Kota Banda Aceh sebesar 99,52 persen berada di atas rata-rata nasional (96,52 persen) dan di atas propinsi Aceh (99,14 persen).

2.2.5 Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya yang merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah swasembada atau kecukupan. Dalam pencapaian swasembada perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan. Menurut *World Health Organization* (WHO) ada tiga komponen utama pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Dalam pengembangannya, teknologi pangan diharapkan mampu memfasilitasi program pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, serta dapat secara efektif mendukung kebijakan strategi ketahanan pangan. Kondisi harga internasional menimbulkan berbagai masalah terhadap

ketersediaan dan distribusi, harga komoditas pangan, terutama pangan strategis seperti beras dan daging sapi.

Ketersediaan pangan adalah sejumlah bahan pangan (makanan) yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu baik dalam bentuk natural maupun bentuk gizinya. Ketersediaan pangan dihitung dari produksi dalam negeri ditambah cadangan pangan dan import dikurangi ekspor. Harga kebutuhan pokok berdasarkan indikator ketahanan pangan Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Berdasarkan Indikator Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2018

NO	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perkembangan harga beras (Rp)	8.867	10.500	10.421	10.578	10.892
2.	Perkembangan harga gula pasir (Rp)	11.235	12.269	14.511	13.340	12.604
3.	Perkembangan harga minyak goreng (Rp)	11.098	10.488	14.511	13.606	13.446
4.	Perkembangan harga telur ayam (Rp)	1.252	1.275	1.384	1.453	1.500
5.	Perkembangan harga daging ayam ras (Rp)	26.832	29.763	30.775	33.768	35.357

Sumber : Diskop, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa harga rata-rata kebutuhan pokok di Kota Banda Aceh terjadi kenaikan harga terutama saat bulan puasa dan menjelang hari Raya Idul Fitri. Harga beras juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada saat harga beras naik adalah secara langsung berkoordinasi dengan Bulog Aceh untuk melakukan operasi pasar sehingga harga beras stabil kembali. Sedangkan untuk mengatasi terjadinya lonjakan harga, Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan stok barang dan

menjaga kestabilan harga. Pemerintah juga berupaya agar permintaan konsumen dapat seimbang dengan persediaan yang ada, sehingga kedepan tidak terjadi gejolak harga yang dapat mempengaruhi perekonomian Kota Banda Aceh.

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Regulasi Daerah Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi perhatian sejak lama bahkan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Dan pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Di Banda Aceh penetapan regulasi untuk pemberantasan kemiskinan difokuskan pada implementasi salah satu misi kota Banda Aceh yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seluruh misi Kota Banda Aceh mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung percepatan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan:

- 1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2017** tentang pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahira Muamalah. Sebagai upaya dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk LKM Syariah. Tujuannya adalah :
 - Meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga.
 - Meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil, dan usaha rumah tangga.
 - Memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

- 2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018** tentang Pencegahan dan Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Qanun ini mengatur tentang kewenangan, pengendalian, penetapan tipologi rumah layak huni dan pengawasan pemerintah kota Banda Aceh untuk mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh sehingga masyarakat bisa tinggal ditempat yang layak huni dalam lingkungan yang bersih dan nyaman.

Qanun ini bertujuan untuk :

- Mengurangi tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan permukiman layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

- 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 tahun 2017** tentang penyesuaian kelompok pelanggan dan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur besaran tarif PDAM berdasarkan kelompok pengguna jasa air minum. Pembedaan tarif ini melindungi kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok sosial umum yaitu kelompok yang memberikan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah; kelompok sosial khusus seperti sekolah, panti asuhan dan terminal air; serta kelompok rumah tangga sangat sederhana dan sederhana.

- 4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2018** tentang Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini bertujuan untuk menangani hal-hal terkait gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya sehingga dapat kembali pada kehidupan yang bermartabat. Pelaksanaannya dilaksanakan secara terintegrasi oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Kesehatan, Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Syariat Islam, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui upaya-upaya yang bersifat :

- Perventif yaitu melalui pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, serta bimbingan sosial.
- Koversif yaitu penertiban, pembinaan spiritual, pembinaan di RSS dan rujukan.
- Rehabilitasi yaitu melalui pemberian motivasi dan diagnose psikososial, penampungan sementara, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, investigasi dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, serta rujukan.
- Reintegrasi sosial yaitu resosialisasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemulangan, serta pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Harga sewa Rumah Susun Sederhana. Peraturan ini mengatur tentang besaran harga sewa yang terjangkau dengan mempertimbangkan pula hunian khusus bagi penyandang cacat. Rumah susun ini merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan dinas Perumahan dan Permukiman (PERKIM) kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah di kota Banda Aceh.

6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian bantuan paket persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir. Pemberian bantuan paket persalinan merupakan salah satu program utama kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak baru lahir. Paket bantuan ini ditujukan bagi warga kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat keterangan telah menetap selama minimal 1 (satu) tahun.

7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tuna netra, Anak Dengan Kecacatan (ADK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB). Adapun tujuan dari penetapan Peraturan Walikota ini adalah untuk meringankan beban hidup penduduk miskin penyandang

disabilitas tuna netra, ADK dan ODKB di Kota Banda Aceh, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

- 8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2018** tentang Bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk santunan kematian bagi penduduk kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang santunan bagi keluarga miskin yang diserahkan kepada ahli waris untuk meringankan beban anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia. Program bantuan santunan kemiskinan ini merupakan salah satu program pemberantasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh.
- 9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 74 Tahun 2018** tentang Tata cara pengalokasian dan rincian alokasi dana gampong untuk tahun anggaran 2019. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh setiap gampong untuk kesejahteraan gampong dan masyarakat di masing-masing gampong di kota Banda Aceh. Pengalokasian dana gampong yang diatur dalam Perwal ini 30% diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan. ADG digunakan untuk membiayai penghasilan keucik dan aparatur gampong, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong.
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015** tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peraturan ini mengatur tentang pemungutan, pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berasal dari pendapatan PNS, Pejabat dan karyawan yang ada di kota Banda Aceh. Pengelolaan ZIS ini dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin dan orang yang berhak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

Seluruh peraturan daerah tersebut menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai sektor baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Hal ini mendukung percepatan pencapaian berbagai target terkait kemiskinan, antara lain:

1. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 7,72 persen di tahun 2015 menjadi 7,25 persen pada akhir tahun 2018.
2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 7,75 persen pada tahun 2017 menjadi 7,29 pada akhir tahun 2018.
3. Angka kematian bayi tercatat 3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018.
4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah 90.62 persen tahun 2018.

3.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyusun berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD sebagaimana tertuang dalam lampiran. Program-program penanggulangan kemiskinan 2019 yang telah dilaksanakan oleh beberapa OPD yang termasuk dalam tim TKPK dibagi menjadi 4 klaster, yaitu:

3.2.1 Klaster 1

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok klaster 1 adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pangan. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Tabel 3.1 Kluster I Program Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga Tahun 2019

Nasional					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Program Indonesia Pintar (PIP)	APBN	Siswa SD keluarga miskin	5,051 siswa	2,272,950,000	Disdikbud
Program Indonesia Pintar (PIP)	APBN	Siswa SMP keluarga Miskin	2,527 siswa	1,895,250,000	Disdikbud
Program Keluarga Harapan	APBN	Masyarakat miskin kota Banda Aceh	4,778 orang	17,557,550,000	Dinas Sosial
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	APBN	Keluarga miskin kota Banda Aceh	6,522 KPM	8,609,040,000	Dinas Sosial
Total				30,334,790,000	

APBA / Otsus					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Beasiswa yatim	APBA / Otsus	Siswa SD yatim	953 siswa	2,287,200,000	Disdikbud
Beasiswa yatim	APBA / Otsus	Siswa SMP yatim	3,844 siswa	9,225,600,000	Disdikbud
Jumlah				11,512,800,000	

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Bantuan sosial untuk disabilitas / direncanakan	APBK	Disabilitas	192 orang	768,000,000	BPKK
Bantuan sosial yang tidak direncanakan / dana kematian, kebakaran	APBK	Keluarga miskin yang meninggal dunia, kebakaran	840 orang	2,680,000,000	BPKK
Bantuan paket persalinan	APBK	Ibu bersalin (bulin) dari keluarga kurang mampu	1,200 ibu hamil	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
Beasiswa miskin untuk santri MUQ	APBK / Zakat	Siswa dari keluarga miskin	5 orang	54,000,000	Baitul Mal
Beasiswa miskin setengah penuh	APBK / Zakat	Siswa dari keluarga fakir miskin	200 orang	540,000,000	Baitul Mal
Beasiswa miskin untuk siswa SD	APBK / Zakat	Siswa SD dari keluarga fakir miskin	1,000 orang	400,000,000	Baitul Mal
Beasiswa miskin untuk siswa SMP	APBK / Zakat	Siswa SMP dari keluarga fakir miskin	1,000 orang	500,000,000	Baitul Mal
Beasiswa miskin untuk MA	APBK / Zakat	Siswa MA dari keluarga fakir miskin	65 orang	39,000,000	Baitul Mal
Beasiswa miskin untuk santri salafi	APBK / Zakat	Santri pesantren salafi dari keluarga miskin	50 orang	300,000,000	Baitul Mal

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Beasiswa untuk tahfiz Al Quran luar negeri (Malaysia dan Thailand)	APBK / Zakat	Tahfiz Quran dari keluarga kurang mampu	18 orang	425,184,000	Baitul Mal
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	APBK / Zakat	Masyarakat miskin kota Banda Aceh	6,100 orang	4,160,000,000	Baitul Mal
Jumlah				11,066,184,000	

3.2.2 Klaster 2

Klaster 2 fokus pada program dan kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dimana kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimiliki walaupun terdapat keterbatasan. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Adapun Program dan kegiatan klaster 2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Banda Aceh yaitu Dana Desa yang merupakan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG).

Tabel 3.2 Klaster 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas

Nasional					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Dana Desa	APBN	Masyarakat miskin di Gampong	90 Gampong	897,201,400	DPMG
Jumlah				897,201,400	

3.2.3 Klaster 3

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dimana masyarakatnya hampir miskin yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. OPD yang terlibat dalam klaster ini yaitu Baitul Mal, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Tabel 3.3 Klaster 3 Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Bantuan Modal Usaha Kecil untuk Masyarakat miskin (dana zakat)	APBK / Zakat	Masyarakat miskin di Kota Banda Aceh	60 orang	180,000,000	Baitul Mal
Bantuan Modal Usaha Kecil untuk masyarakat miskin (dana infaq)	APBK / Zakat	Masyarakat miskin di Kota Banda Aceh	208 orang	624,000,000	Baitul Mal

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	APBK	Masyarakat miskin di Kota Banda Aceh	1 kali	44,250,000	DP3AP2KB
Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	APBK	Masyarakat miskin di Kota Banda Aceh	20 orang	97,600,000	DP3AP2KB
Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan UKM	APBK	Kelompok usaha	9 kec	379,874,838	Diskop, UKM dan Dag
Belanja Hibah Barang Atau Jasa (Bantuan Modal berupa barang	APBK	Kelompok Usaha yang beranggotakan masyarakat miskin	350 UKM	12,250,000,000	Diskop, UKM dan Dag
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	APBK	Kelompok Usaha yang beranggotakan masyarakat miskin	18 paket bantuan	1,559,500,000	Disnaker
Jumlah				15,135,224,838	

3.2.4 Klaster 4

Program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan program pro-rakyat yaitu penyediaan rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, peningkatan kehidupan untuk nelayan, peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. OPD yang terlibat pada klaster ini adalah Baitul Mal,

Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.4 Klaster 4 Program Pembangunan Pro-Rakyat

Nasional					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	APBN	Pencari kerja di Kota Banda Aceh	506 orang	1,388,720,000	Disnaker
Jumlah				1,388,720,000	

APBA/Otsus					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Bantuan UEP untuk fakir miskin	APBA / Otsus	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	140 KK	840,000,000	Dinsos
Pemberian Bantuan RS-RTLH	APBA / Otsus	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	24 KK	360,000,000	Dinsos
Jumlah				1,200,000,000	

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Pelatihan keterampilan	APBK/ Zakat	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	48 orang	100,800,000	Baitul Mal
Pembangunan rumah dhuafa	APBK/ Zakat	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	20 unit	2,550,000,000	Baitul Mal
Renovasi rumah dhuafa	APBK/ Zakat	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	8 unit	675,000,000	Baitul Mal
Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan kepada PMKS	APBK	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	1 kegiatan	423,366,900	Dinsos
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	APBK	Keluarga miskin di kota Banda Aceh	72 KK	272,605,350	Dinsos
Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Plus	APBK	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	31 unit	3,828,500,000	Dinas Perkim
Rehap Rumah Layak Huni	APBK	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	2 unit	56,525,000	Dinas Perkim
Peningkatan Kualitas Rumah	APBK/ DAK	Masyarakat miskin di kota Banda Aceh	147 unit	2,622,333,000	Dinas Perkim
Pengadaan Palka Ikan Kec. Meuraxa	APBK	Nelayan di Kecamatan Meuraxa	7 orang	150,000,000	DP2KP
Rumpon (Rumah Ikan)	APBK	Nelayan di Kota Banda Aceh	7 orang	200,000,000	DP2KP
Bantuan Alat Kerja Bagi Nelayan	APBK	Nelayan di Kecamatan Kuta Alam	11 orang	100,000,000	DP2KP

Daerah					
Nama Program	Jenis Transfer	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Lembaga Pelaksana
Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Jaring Ikan Kelompok Nelayan	APBK	Kelompok Nelayan di Kecamatan Syiah Kuala	52 orang	75,000,000	DP2KP
Pengadaan Mesin Boat 32 PK untuk Kelompok Nelayan Jasa Nelayan	APBK	Kelompok nelayan di Kecamatan Meuraxa	5 orang	45,000,000	DP2KP
Jumlah				11,596,004,900	

3.3 Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan

3.3.1 Analisis Pendapatan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur peraturan tentang pengelolaan pendapatan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dimasing-masing daerah. Peraturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran dari penyusunan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ini adalah tercapainya standar kualitas atas program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh BPKP baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah dalam mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2018 PAD ini diharapkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
- b. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah.

Kebijakan keuangan daerah lebih ditekankan pada pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah kota Banda Aceh sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya sebesar 171,777 miliar di tahun 2014 dan terus meningkat menjadi 270,170 miliar di tahun 2017. Namun terjadi penurunan PAD di tahun 2018 sebesar 8,48 % dengan jumlah PAD sebesar 246,27 miliar. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 PAD Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami kenaikan sebesar 14,81 persen. Kenaikan ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah Kota Banda Aceh yang dinilai telah mampu mengelola potensi PAD dengan baik.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pada Tahun 2014 realisasi dana perimbangan Pemerintah

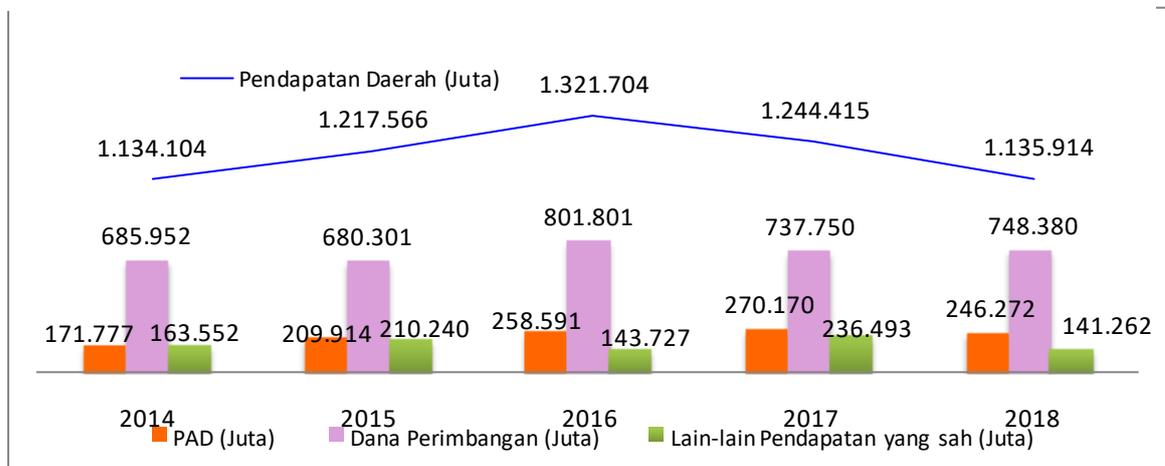
Kota Banda Aceh sebesar Rp. 685,952 miliar dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 748,380 miliar lebih.

Sumber pendapatan daerah yang lain yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Pendapatan Yang Sah Lainnya. Sumber pendapatan ini dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,44 persen. Namun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menunjukkan trend terus menurun secara signifikan. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 163,552 miliar dan mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun sampai tahun 2018 menjadi 141,262 miliar.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.135.919.788.393,- atau 93,27 persen dari yang ditargetkan dan menurun sebesar 8,72 persen dari realisasi tahun anggaran 2017. Sumber penerimaan pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 bersumber dari dana perimbangan sebesar 65,88 persen dan proporsi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,44 persen sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,68 persen.

Perkembangan realisasi pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh dari kurun waktu 2014 – 2018 dari berbagai sumber pendanaan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018



Sumber : BPKK Kota Banda Aceh 2019 (data diolah)

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber - sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain.

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- a. Meningkatkan penyuluhan pajak/retribusi kepada masyarakat.
- b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
- c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- d. Menyusun Qanun baru dan merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
- e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak taat pajak.
- g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin dengan instansi terkait.

Berikut adalah perkembangan target dan realisasi PAD di Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2014 -2018



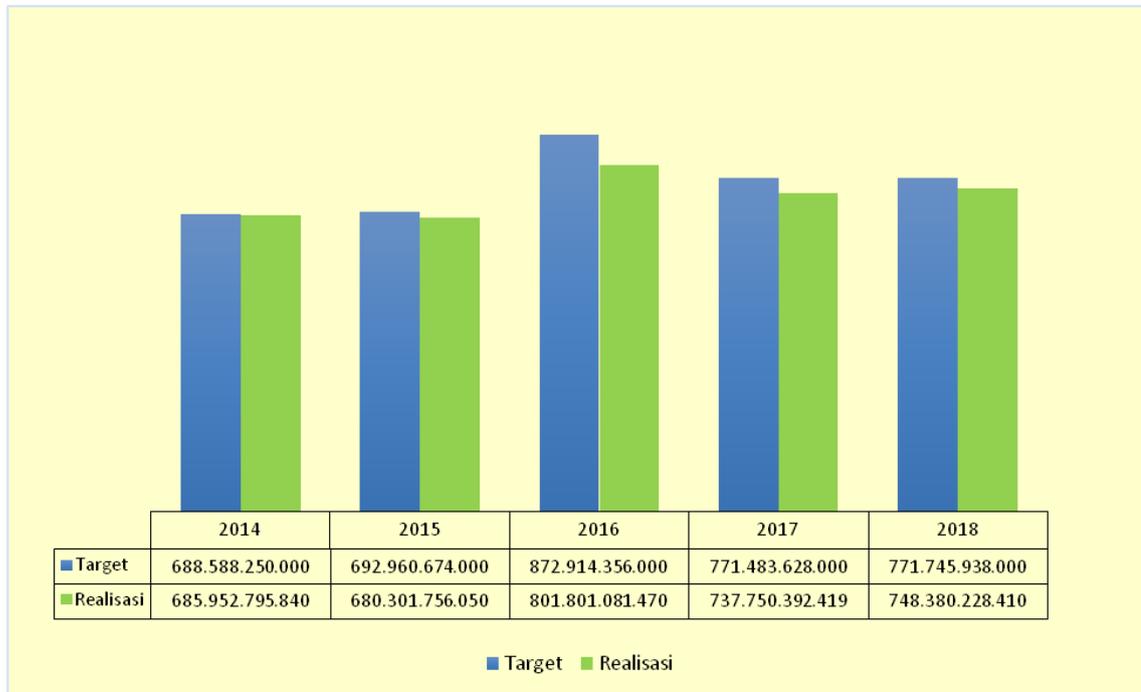
Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2019 (data diolah)

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat karena merupakan dana transfer dari Pusat memiliki proporsi sebesar sekitar 60 persen dari ABPK di kurun waktu TA 2014-2018. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah melalui APBN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah yang pada saat ini kebijakannya adalah dengan prinsip *money follows function*.

Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus selama 5 tahun terakhir 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,81 persen. Berikut dapat dilihat perkembangan target dan realisasi dana perimbangan Kota Banda Aceh.

Gambar 3.3 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018



Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2019 (data diolah)

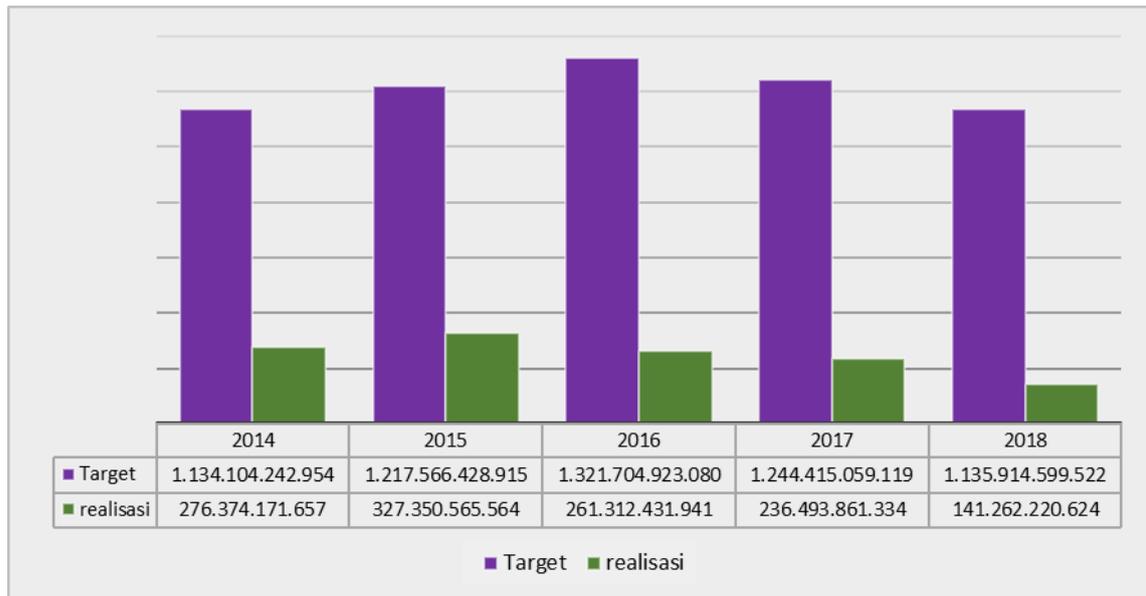
3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah. Pendapatan Daerah dari lain-lain pendapatan yang sah adalah Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer lainnya, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Umum atau Khusus dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, hibah dari APBN, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, dan dana darurat dari APBN.

Perkembangan realisasi pendapatan pemerintah Kota Banda Aceh yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang sah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,72 persen. Kontribusi dari pendapatan ini pada keseluruhan pendapatan daerah adalah sebesar 20,49 persen.

Penerimaan pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah lainnya. Realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah di tahun 2018 adalah sebesar Rp.141,262,220,624 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah Rp.236,493,861,334. Tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan. Realisasi pendapatan Lain-Lain Daerah Yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Kontribusinya Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014 – 2018



Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2019 (data diolah)

BAB IV

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Kelembagaan TKPK

Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dibentuk tim koordinasi yang berada di pusat dan daerah. Pada tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres Nomor 15 Tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dimasing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010.

Tugas dan Tanggung Jawab tim TKPK yaitu :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).
- b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Banda Aceh tahun 2019 dibentuk sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh tahun 2019. Pembentukan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh terdiri dari Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja) bidang pendataan dan informasi, Pokja bidang pengembangan kemitraan, pokja bidang Pengaduan Masyarakat, Kelompok

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 122 Tahun 2019, TKPK Kota Banda Aceh memiliki tugas :

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Banda Aceh sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh di bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Pengkoordinasian SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD.
 - c. Pengkoordinasian SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD.
 - d. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, dengan fungsi :
 - a. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Pengendalian dan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik.
 - d. Evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan.

- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan untuk disampaikan kepada Walikota Banda Aceh dan TKPK Provinsi.

Sekretariat TKPK Tahun 2019 berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh di Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA. Tugas sekretariat TKPK adalah menunjang kegiatan pokja dengan mengkoordinir OPD terkait, melakukan evaluasi progres fisik dan keuangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan OPD setiap bulannya, juga melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang anggotanya terdiri dari Bappeda dan DPMG. Sementara anggota kelompok kerja dan kelompok program terdiri dari OPD terkait. Terkait pembiayaan, TKPK Kota Banda Aceh mendapat alokasi dana operasional setiap tahunnya dari APBK, dengan besaran biaya sebesar Rp.103.452.270,- di tahun 2019.

TKPK bekerjasama dengan UPTB GIS Bappeda dan juga Faskel (fasilitator kelurahan) PNPM telah melaksanakan survey validasi data kemiskinan yang berasal dari data TNP2K tahun 2011 serta membangun sebuah aplikasi berbasis web yang bernama SPPKS (Sistem Pemantauan Program Kesejahteraan Sosial). Aplikasi ini dapat mengintegrasikan data-data kemiskinan lainnya yang bersumber dari berbagai instansi, baik dari kementerian maupun dari OPD Kota Banda Aceh. Data tersebut antara lain: Data Jamkesmas, data Rastra, data bantuan fakir miskin dari Baitul Mal, data siswa miskin, data BLSM, bantuan untuk nelayan, data anak panti asuhan dan lain-lain. Keseluruhan data tersebut di korelasikan dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh sehingga bisa dilihat apakah program penanggulangan kemiskinan ini dapat berdampak langsung bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh atau data masyarakat dari luar Kota Banda Aceh.

Hal ini membantu proses updating data penduduk miskin yang lebih akurat. Dari hasil survey validasi di lapangan dan setelah dikorelasi dan diverifikasi dengan data kemiskinan lainnya, maka ditemukan sebagian kecil dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berasal data dari TNP2K tahun 2011 tidak dapat ditemukan lagi karena sudah pindah ke tempat lain, sudah meninggal atau RTS tersebut tidak diketahui pernah tinggal di lingkungan itu

sebelumnya. Dengan adanya aplikasi SPPKS yang berbasis web atas dasar data *by name, by address dan by GPS serta by Donation*, maka program yang telah dilaksanakan dari berbagai instansi dengan mudah dievaluasi dan analisa kerana telah terintegrasi satu dengan lainnya. Misalnya: pada saat Pemko Banda Aceh akan melaksanakan program Bantuan Rumah Dhuafa yang berasal dari anggaran OTSUS melalui Dinas PU dan juga bantuan Rumah Dhuafa serta perbaikan rumah yang anggarannya berasal dari Baitul Mal, dengan menggunakan aplikasi SPPKS maka dengan mudah dipilah data-data berdasarkan kondisi rumah yang diinginkan, lokasi berdasarkan kecamatan, status rumah serta gambarnya dan juga dapat ditentukan profil kepala keluarga dan juga anggota keluarga karena sudah berkorelasi dengan data dari Disdukcapil.

Pada tahun 2016 TKPK bersama UPTB GIS Bappeda kota Banda Aceh mengembangkan aplikasi SPPKS yang dapat diakses langsung oleh masyarakat gampong. Pengembangan aplikasi ini disebut DKMG (Database Kemiskinan Masyarakat Gampong). Melalui aplikasi DKMG, data penduduk miskin pergampong akan diinput secara langsung oleh masing-masing operator gampong. Tujuannya adalah agar gampong dapat mengupdate sendiri data perubahan penduduk miskin setiap tahun serta menghindari komplain dari para keuchik (kepala desa) saat penyaluran bantuan bagi fakir miskin.

Pada tahun 2019 TNP2K meluncurkan buku Analisis Belanja Publik untuk penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh yang diserahkan pihak TNP2K kepada Walikota Banda Aceh. Buku ini merupakan hasil kerjasama TNP2K dari daerah replikasi pengembangan model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan. Buku ini juga merupakan panduan bagi TKPK untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Upaya ini ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi APBD sebagai alat perencanaan dan koordinasi, APBD harus dapat memastikan bahwa program-program yang dirumuskan relevan dengan akar-akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Sedangkan APBD sebagai koordinasi harus dapat menjamin adanya keselarasan antar program secara lintas sektoral dalam mencapai target yang hendak dicapai. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di

daerah dapat memainkan peran kunci dalam pemanfaatan data dan analisis bagi perencanaan prioritas dan penetapan sasaran intervensi kebijakan, serta penganggarannya melalui APBD.

4.2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena tugas TKPK terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TKPK kabupaten/kota pada umumnya adalah rapat-rapat koordinasi. Namun selain rapat-rapat koordinasi TKPK juga melakukan kegiatan-kegiatan non rapat antara lain memfasilitasi data penduduk miskin di Kota Banda Aceh dengan pembentukan tim sekretariat Kota Banda Aceh yang berpusat di Bappeda Kota Banda Aceh.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh, serangkaian koordinasi telah dibangun oleh TKPK melalui berbagai kegiatan untuk membangun kesepahaman dalam aktivitas penanggulangan kemiskinan. Koordinasi ini dilakukan baik antar Tim TKPK Kota Banda Aceh maupun dengan tim TKP2K Aceh dan TNP2K serta OPD terkait. Pada tahun 2019 ini telah dilakukan 11 (sebelas) kali rapat koordinasi dan *launching*, baik rapat lengkap maupun rapat terbatas sesuai kebutuhan masing-masing pokja tim TKPK Kota Banda Aceh.

Berbagai kegiatan koordinasi untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2019 yang telah dilaksanakan diantaranya adalah *Launching* analisis belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan di kota Banda Aceh, Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Banda Aceh tahun 2019 serta Evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan per OPD tahun 2019.

4.3 Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan

4.3.1 Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan sektor telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat guna menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan. Maksud baik pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan setelah krisis ekonomi masih tetap konsisten. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak dari tingginya tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan. Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBDK diprioritaskan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pemerintah juga berupaya untuk menetapkan sasaran sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Untuk mengawasi ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan terkait kemiskinan, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh TKPK Banda Aceh secara berkala. Kegiatan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan OPD pelaksana kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga berbagai temuan dan hasil yang didapat di lapangan dapat secara langsung dievaluasi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Adapun capaian progres fisik dan keuangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara detail per bulan dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Sedangkan rekapan Anggaran Program Kegiatan penanggulangan kemiskinan per OPD tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1 Rekap Anggaran Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Per Klaster Tahun 2019

No	Klaster	SKPD	Sumber Dana			Total Anggaran
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS	APBK (Rp)	
1	Klaster 1	Disdikbud, BPKK, Dinkes, Baitul Mal, Dinsos	30,334,790,000	11,512,800,000	11,066,184,000	52,913,774,000
2	Klaster 2	DPMG	897,201,400			897,201,400
3	Klaster 3	Baitul Mal, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker			15,135,224,838	15,135,224,838
4	Klaster 4	Baitul Mal, Dinsos, Disnaker, Dinas Perkim, DP2KP	1,388,720,000	1,200,000,000	11,596,004,900	14,184,724,900
Total			32,620,711,400	12,712,800,000	37,797,413,738	83,130,925,138

Sumber : Evaluasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2019

Tabel 4.2 Rekap Evaluasi per OPD Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	JUMLAH KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK 100%	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK <100%	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
1	DISDIKBUD	1	15,681,000,000	4	4	0	100.00	
2	BPKK	1	3,448,000,000	2	0	2	85.74	Tidak melengkapi berkas, pindah & meninggal dunia
3	DINKES	1	1,200,000,000	1	1	0	100.00	
	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	10,547,984,000	13	2	11	86.37	1. Ada siswa/santri tidak melanjutkan pendidikan. 2. Tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan zakat. 3. Ada santri sudah berkeluarga. dll

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	JUMLAH KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK 100%	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK <100%	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	KETERANGAN
5	DINSOS	1 dan 4	28,062,562,250	6	4	2	98.45	1. Penyaluran PKH 4 tahap dihitung dan disalurkan oleh pusat, realisasinya sesuai dengan data PKH terupdate (terkini). 2. Data target setiap bulan nya telah ditetapkan dalam SK penerima BPNT untuk KPM Kota Banda Aceh, tetapi realisasinya mengalami pengurangan disebabkan oleh adanya beberapa KPM yang mengalami perubahan status seperti ekonomi telah mampu, meninggal, dan pindah domisili.
6	DPMG	2	897,201,400	1	0	1	21.11	Ketidakesesuaian Realisasi Fisik dan Keuangan dikarenakan Target Fisik yang menargetkan 90 Gampong tetapi pada pelaksanaan hanya 19 Gampong yang merealisasikan
7	DINAS P3AP2KB	3	141,850,000	2	2	0	100.00	
8	DISKOP, UKM & DAG	3	12,629,874,838	2	2	0	100.00	
9	DISNAKER	3 dan 4	3,445,094,650	2	2	0	100.00	
10	DINAS PERKIM	4	6,507,358,000	3	2	1	99.09	Karena Masyarakat tidak mampu lagi berswadaya
11	DP2KP	4	570,000,000	5	5	0	100.00	
	TOTAL		83,130,925,138	41	24	17	90.07	

Sumber : Evaluasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2019

Persentase realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan kota Banda Aceh per OPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Per OPD Tahun 2019

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	DISDIKBUD	1	15,681,000,000	15,628,500,000	99.31	100.00
2	BPKK	1	3,448,000,000	2,796,000,000	85.23	85.74
3	DINKES	1	1,200,000,000	1,138,900,000	94.91	100.00
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	10,547,984,000	9,121,321,500	88.83	86.37
5	DINSOS	1 dan 4	28,062,562,250	27,338,347,038	98.36	98.45
6	DPMG	2	897,201,400	369,468,104	41.18	21.11
7	DINAS P3AP2KB	3	141,850,000	127,830,300	92.19	100.00
8	DISKOP, UKM & DAG	3	12,629,874,838	11,590,000,000	60.45	100.00
9	DISNAKER	3 dan 4	3,445,094,650	3,408,621,500	99.01	100.00
10	DINAS PERKIM	4	6,507,358,000	6,428,484,000	98.82	99.09
11	DP2KP	4	570,000,000	560,800,000	98.56	100.00
	TOTAL		83,130,925,138	78,508,272,442	86.99	90.07

Sumber : Evaluasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 2019

4.3.2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mengenai program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, masyarakat kota Banda Aceh dapat melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan berbagai upaya dalam penanganan kemiskinan kepada OPD terkait. Pengaduan permasalahan, pertanyaan atau koordinasi dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis dengan metode penanganan masalah dilakukan secara hirarki maupun birokrasi.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Banda Aceh secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat khususnya terkait pelayanan penanggulangan kemiskinan di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sistem pengaduan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan sistem online melalui nomor layanan khusus via sms dan e-mail; dan juga dengan sistem manual dimana masyarakat langsung bisa datang menemui dinas atau badan terkait yang sudah ditunjuk untuk mengadukan permasalahannya. Ada beberapa tempat pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, yaitu pengaduan melalui Kantor Bappeda Kota Banda Aceh, Kantor Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Banda Aceh serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

4.3.2.1 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Banda Aceh telah membuka nomor khusus Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM) melalui no kontak: 0811683005 atau email: <http://lpm.bandaaceh.go.id>. yang dapat diakses langsung oleh masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap pengaduan yang disampaikan, baik melalui telepon atau email: akan secara otomatis diterima oleh sistem dan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah. Secara bersamaan, pengaduan tersebut juga diteruskan kepada masing-masing admin OPD terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu 2 x 24 jam. Jawaban OPD akan diteruskan kembali oleh admin ke sistem dan sistem akan meneruskan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.

Adapun pengaduan yang selama ini disampaikan oleh masyarakat terdiri dari keluhan, pertanyaan, saran/usul, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Beberapa pengaduan tersebut tidak perlu ditanggapi, karena lebih berupa masukan dan saran kepada pemerintah Kota Banda Aceh.

4.3.2.2 Penanganan Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019

4.3.2.2.1 Pengaduan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019

Program BPNT adalah bantuan sosial pangan yang secara non tunai dengan mengambil beras dan telur saja. BPNT merupakan peralihan dari rastra (beras sejahtera) yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat). BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH dan Pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri dan BTN (AgenBrilink).

Tujuan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu program ini diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha eceran rakyat. BPNT disalurkan melalui Kartu Kombo sebagai instrumen pembayaran termasuk KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM sebesar Rp. 110.000,00 ribu/ bulan untuk membeli beras di agen penjual e-Warong maupun agen Brilink yang ada di setiap desa. Bantuan sosial BPNT ini tidak bisa diambil tunai dan hanya ditukarkan dengan beras dan telur.

E-Warong adalah agen penyalur bahan pangan dan tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM berupa beras dan telur.

Bahan sembako tersebut tidak boleh dipaketkan, jadi KPM boleh memilih sesuai dengan kemauan mereka sesuai dengan besaran bantuan yaitu Rp.110.000,00.

Tempat pencairan BPNT yaitu *pertama* e-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang merupakan bantuan langsung dari Kementerian Sosial yang pengurusnya adalah 10 orang KPM dan dibantu oleh pendamping PKH, *kedua* yaitu AgenBrilink yang merupakan pedagang kelontong yang berkerjasama dengan pihak Bank BRI. Disini kita tidak mengarahkan KPM ke e-Warong KUBE maupun ke AgenBrilink, sesuai dengan keinginan KPM dan tergantung jarak KPM tersebut ketempat pencairan/e-Warong.

Saat ini ada 112 e-warong untuk memenuhi kebutuhan KPM di Kota Banda Aceh. Untuk komoditi beras yaitu suppliernya adalah Bulog serta telur dari bulog tetapi sebagian telurnya dari supplier lokal.

Tabel 4.4 Jumlah Penerima BPNT Kota Banda Aceh Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penerima BPNT
1	BAITURRAHMAN	824
2	BANDA RAYA	564
3	JAYA BARU	588
4	KUTA ALAM	811
5	KUTA RAJA	528
6	LUENG BATA	661
7	MEURAXA	594
8	SYIAH KUALA	734
9	ULEE KARENG	934
	JUMLAH	6238

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019

- A. Permasalahan pada BPNT pada KPM
1. Jaringan yang dirasakan oleh KPM penerima BPNT dimana pada saat mereka datang ke e-Warong tidak bisa melakukan transaksi dikarenakan jaringan masih lemah, sehingga menyita waktu mereka.
 2. Ada beberapa KPM yang saldo nol, tetapi itu langsung di tindaklanjuti oleh pendamping dan dilaporkan kepada petugas Bank BRI yang menangani Bansos ini.
 3. Ada sebagian KPM yang meminta selain beras dan telur, dengan meminta minyak, gula dan lainnya, hal ini tidak boleh dilakukan. Sehingga para pendamping selalu mengingatkan dan langsung menegur jika ada yang meyalahi aturan pencairan BPNT ini.
- B. Kemudahan dalam BPNT pada KPM
1. Tepat sasaran.
 2. Masyarakat terbantu dengan kemudahan mendapatkan beras/telur.
 3. Tidak bagi rata seperti rastra.
 4. Ada kartu KKS sejenis ATM yang memudahkan untuk di bawa-bawa
 5. Tepat waktu yaitu sebulan sekali.
 6. Boleh memilih beras maupun telur sesuai dengan keinginan KPM.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Penyelesaian Program BPNT

No	Kecamatan	Keluhan	Jumlah Keluhan	Penyelesaian	Keterangan
1	Baiturrahman	ATM hilang/ rusak, hilang kartu	2 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
2	Jaya Baru	KKS hilang	1 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
3	Banda Raya	ATM hilang/ rusak, KKS rusak	1 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
4	Kuta Raja	Kartu rusak	1 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses

No	Kecamatan	Keluhan	Jumlah Keluhan	Penyelesaian	Keterangan
5	Kuta Alam	Kartu rusak	3 Orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
6	Lueng Bata	Kartu hilang/rusak	1 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
7	Meuraxa	ATM hilang, KKS rusak	0	-	-
8	Syiah Kuala	KKS rusak/kartu rusak	1 orang	Sudah dikonfirmasi ke Bank Penyalur	Dalam proses
9	Ulee Kareng	KKS rusak	0	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2019

C. Pengaduan oleh masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Dinas sosial melakukan pengecekan data setiap warga yang melakukan pengaduan untuk memastikan apakah mereka masuk ke dalam data BDT atau tidak. Jika mereka terdata dalam BDT, artinya mereka masuk ke daftar antrian atau daftar tunggu, yang karena terbatasnya kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada fakir miskin di Kota Banda Aceh sehingga tidak terdaftar sebagai penerima untuk tahun ini.

Selain itu, pendataan dan pengusulan baru bagi warga yang tidak masuk kedalam data BDT, juga dapat dilakukan pendataannya. Warga miskin yang ada di Kota Banda Aceh untuk didata keberadaannya dan di input di sistem SIKS-NG melalui operator dan disahkan oleh Walikota. Pada tahun 2019 banyak masyarakat yang melaporkan dirinya langsung ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

D. Proses pengaduan

Selama tahun 2019 proses pengaduan yaitu melalui SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) adalah tempat pengaduan masyarakat yang mana langsung ditangani berbagai permasalahan sosial. Pengaduan yang

dilakukan bersifat langsung maupun by handpone sesuai dengan kondisi di lapangan dan tindakannya langsung petugas fasilitator mendatanya.

4.3.2.2.2 SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) Tahun 2019

SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

SLRT bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, meningkatkan akses layanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar dan mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.

Saat ini dalam SLRT terdiri dari 1 Manager yang membawahi 9 supervisor dan 50 fasilitator. Jumlah SDM tersebut tidak cukup untuk memfasilitasi 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Banyak keluhan masyarakat yang mendatangi sekretariat SLRT yang ada di Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah ditangani dan dilaporkan. Kebanyakan yang mendatangi adalah warga yang kurang mampu dan ingin mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT. Dari mereka yang datang tersebut banyak status mereka tidak terdata di BDT sehingga dilakukan pendataan warga tersebut.

Yang sudah dilakukan di tahun 2019 ini adalah menginput data sebanyak 1.000 warga miskin untuk di input dan didaftarkan untuk bisa masuk kedalam BDT melalui SIKS-NG.

Tabel 4.6 Jumlah Pengaduan SLRT Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah
1	Baiturrahman	23
2	Banda Raya	40
3	Jaya Baru	18
4	Kuta Alam	91
5	Kuta Raja	18
6	Lueng Bata	52
7	Meuraxa	38
8	Syiah Kuala	33
9	Ulee Kareng	25

4.3.2.2.3 Subsidi Listrik

Selain dari warga yang ingin ada nomor ID BDT untuk mendapatkan bantuan, ada juga warga yang akan mengajukan serta mendapatkan ID BDT untuk mendapatkan subsidi listrik di tahun 2019 ini.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Buku Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh telah disusun atas kerjasama TPN2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dengan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Banda Aceh. Buku ini disusun sebagai panduan bagi tim TKPK untuk melaksanakan tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Dalam buku ini dijelaskan model analisis situasi kemiskinan dan evaluasi relevansi program dan anggaran serta rekomendasi proses advokasi untuk diterapkannya model tersebut di dalam siklus rutin perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh selama lima tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2014 (7,78 persen) turun menjadi 7,72 persen pada tahun 2015, tahun 2016 sebesar 7,41 persen, sedangkan tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan (7,44 persen) dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,25 persen. Hal ini secara teoritis dan statistis diakibatkan karena semakin rendah persentase tingkat kemiskinan maka semakin lambat pula penurunan pada periode waktu berikutnya.
3. Pelaksanaan bantuan yang dilakukan oleh masing-masing OPD melalui APBD Kota Banda Aceh masih bersifat top down karena paket bantuan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD tersebut. Sedangkan bantuan dana desa dinilai lebih optimal karena bantuan keuangan tersebut langsung disalurkan ke gampong-gampong yang ada di Kota Banda Aceh.
4. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar.
5. Stabilitas ekonomi akan meningkatkan kepastian berusaha yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan pendapatan riil masyarakat miskin. Kebijakan ekonomi makro merupakan

landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar.

6. Rencana aksi penanggulangan kemiskinan disusun agar penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan.

5.2. Rekomendasi

1. Guna terwujudnya pengelolaan data penduduk miskin yang baik, maka perlu dilakukan pembaharuan (update) Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang komprehensif yang memuat berbagai informasi penting mengenai status penduduk miskin tersebut beserta intervensi program / kegiatan yang sudah diterimanya dan juga adanya sinkronisasi data dari semua OPD sehingga penerima bantuan tidak tumpang tindih.
2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat penerima bantuan kemiskinan apakah penerima bantuan tersebut sudah bebas dari tingkat kemiskinan sehingga pada tahun berikutnya bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
3. Mengevaluasi kembali program-program kemiskinan yang dilakukan oleh OPD apakah program-program tersebut tepat sasaran dalam memberantas kemiskinan di Kota Banda Aceh.
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan reorientasi kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran dan penataan kelembagaan yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus, maka rencana aksi penanggulangan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumberdaya alam dan rasa aman.

6. Hendaknya kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.
7. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
8. Agar upaya penyelamatan pemberdayaan masyarakat miskin benar-benar dapat berjalan efektif, maka diperlukan revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar berpihak kepada lapisan masyarakat yang miskin khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan.
9. Tindakan yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu: (1) mengurangi kemiskinan dari segi pendapatan melalui pertumbuhan, (2) memperkuat kemampuan sumberdaya manusia, (3) mengurangi tingkat kerentanan dan risiko di antara rumah tangga miskin, dan (4) memperkuat kerangka kelembagaan.
10. Kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD maupun seluruh anggota TKP2K Aceh perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja TKPK Kota Banda Aceh.
11. Meningkatkan keterlibatan seluruh stakeholder (perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD) dalam pemberdayaan program CSR.

**Lampiran 1 Evaluasi Program Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019**

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DISDIKBUD KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	SD																				
	PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)	1	2.272.950.000			2.272.950.000	5.051 siswa			1.055			2.002			1.500			494	100,00	
						100,00				1.055			2.002			1.500			494		
	YATIM	1		2.287.200.000		2.287.200.000	953 siswa					700					200		53	100,00	
						100,00						700					200		53		
2	SMP																				
	PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)	1	1.895.250.000			1.842.750.000	2.527 siswa								1.000		1.000	300	257	100,00	
						97,23									800		1.000	500	257		
	YATIM	1		9.225.600.000		9.225.600.000	3.844 siswa									3.000		844		100,00	
						100,00									3.000		844				
	TOTAL		4.168.200.000	11.512.800.000																	
	Total Realisasi Keuangan					15.628.500.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	8,50	0,00	5,64	16,14	0,00	8,06	36,28	9,67	9,22	6,48		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					99,31	Target Kumulatif	0,00	0,00	8,50	8,50	14,15	30,29	30,29	38,35	74,62	84,30	93,52	100,00		
								Total Realisasi s/d Desember 2019													100,00

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Bantuan Sosial	1																			
	Disabilitas/Direncanakan	1			768.000.000	712.000.000	192 Orang					192								93,75	Tidak melengkapi berkas, pindah & meninggal dunia
						92,71						178						2			
	Bantuan yang Tidak Direncanakan	1			2.680.000.000	2.084.000.000	840 org		71	75	60	80	90	100	30	90	60	90	94	77,74	
						77,76			67	69	40	60	13	100	28	78	52	52	94		
	Total				3.448.000.000																
	Total Realisasi Keuangan				2.796.000.000		Target/ Bulan	0,00	6,88	7,2674	5,814	26,36	8,72	9,69	2,91	8,72	5,81	8,72	9,11		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan				85,23		Target Kumulatif	0,00	6,88	14,15	19,96	46,32	55,04	64,73	67,64	76,36	82,17	90,89	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2019																				85,74	

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS KESEHATAN KOTA Banda Aceh 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET	
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Jaminan Persalinan	1			1.200.000.000	1.138.900.000	1200 bumil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200		100,00		
	Jumlah paket persalinan yang diterima oleh bulin dari keluarga kurang mampu					94,91		0	0	0	0	0	0	0	0	598	0	302	300			
	Total				1.200.000.000																	
	Total Realisasi Keuangan					1.138.900.000	Target/ Bulan	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	16,67	0,00			
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					94,91	Target Kumulatif	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	100,00	100,00			
																				Total Realisasi s/d Desember 2019		100,00

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET			
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Beadiswa Miskin	1																						
	- MUQ : 5 org x 12 bln x Rp.900.000,- dengan rincian : 1. Santri MUQ Angk V (3 org x 12 bln x Rp.900.000 = Rp.32.400.000), 2. Santri MUQ Angk V (2 org x12 bln x Rp.900.000 = Rp.21.600.000)	1			54.000.000	35.100.000	5 org x 12 bln	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
						65,00		5	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1	1		65,00	ada siswa tidak melanjutkan pendidikan di MUQ tersebut		
	- Setengah penuh : 200 org x 12 bln x Rp. 300.000,- dengan rincian : 1. setengah penuh tahap V (100 org x 12 bln x Rp.300.000 = 360.000.000), 2. setengah penuh tahap VI (100 org x 6 bln x Rp.300.000 = 180.000.000)	1			540.000.000	537.300.000	200 org x 12 bln	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	99,50	ada siswa yang selesai dan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA	
						99,50		100	100	100	99	99	99	199	199	199	199	199	199	199		99,50		
	a. SD : 1.000 org x Rp. 400.000,-	1			400.000.000	396.400.000	1000 org													1000		99,10	ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan zakat	
						99,10														991		99,10		
	b. SMP : 1.000 org x Rp. 500.000,-	1			500.000.000	463.000.000	1000 org														1000		92,60	ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan zakat
						92,60															926		92,60	
	c. MA : 65 org x Rp. 600.000,-	1			39.000.000	38.400.000	65 org														65		98,46	ada siswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan zakat
						98,46															64		98,46	
	- Santri Pesantren Salafi : 50 org x 12 bln x Rp 500,000,-	1			300.000.000	241.500.000	50 org	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	80,50	ada santri yang tdk melanjutkan pendidikan dan ada juga yg sdh berkeluarga	
						80,50		42	42	42	41	41	41	39	39	39	39	39	39	39	39		80,50	

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET		
			APBN (Rp)	APBA/OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	- Tahfiz Al-Qur'an (luar negeri) Malaysia dan Thailand: 18 org x 12 bln	1			425.184.000	406.221.500	18 org x 12 bln	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	86,11	Ada santri yang sdh selesai		
						95,54		17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
2	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	1			4.160.000.000	4.100.800.000	6100					6100								100,02			
						98,58						6101											
3	Bantuan Modal Usaha kecil untuk keluarga miskin (dana zakat)	3			180.000.000	180.000.000	60 Orang											60		136,67			
						100,00												82					
4	Bantuan Modal Usaha kecil untuk keluarga miskin(dana infaq)	3			624.000.000	397.500.000	208 Orang												208	80,29	tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil survey koordinator kecamatan		
						63,70													167				
5	Pelatihan ketrampilan	4			100.800.000	60.100.000	48 orang										48	48	48	77,08	Peserta yang mendaftar tidak memenuhi persyaratan		
						59,62											37	37	37				
6	Rumah Duafa																						
	- Pembangunan Rumah Dhuafa	4			2.550.000.000	2.040.000.000	20 unit												20	95,00	pengajuan manfaat tdk memenuhi persyaratan atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan		
						80,00													19				
	- Renovasi Rumah dhuafa	4			675.000.000	225.000.000	8 unit												8	12,50	Proposal yang diterima sedikit dan hasil verifikasi tidak layak menerima bantuan		
						33,33													1				
	TOTAL				10.547.984.000																		
	Total Realisasi Keuangan					9.121.321.500	Target/Bulan	1,5336	1,5336	1,5336	1,5336	55,607	1,5336	2,42	2,42	2,42	2,8455	23,526	3,0937				
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					88,83	Target Kumulatif	1,5336	3,0671	4,6007	6,1342	61,741	63,275	65,695	68,115	70,535	73,38	96,906	100,00				
																				Total Realisasi s/d Desember 2019		86,37	

Lampiran I

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	17.557.550.000			17.557.550.000	4778	4.778			4.778			4.778			4.778			97,49	Penyaluran PKH 4 tahap dihitung dan disalurkan oleh pusat, realisasinya sesuai dengan data PKH terupdate (terkini)
						100,00		4.778			4.673			4.661			4.521				
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1	8.609.040.000			7.890.080.000	6522 KPM	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	91,65	Data target setiap bulannya telah ditetapkan dalam SK penerima BPNT untuk KPM Kota Banda Aceh, tetapi realisasinya mengalami pengurangan disebabkan oleh adanya beberapa KPM yang mengalami perubahan status seperti ekonomi telah mampu, meninggal, dan pindah domisili.
						91,65		5.791	5.791	5.791	5.791	5.788	5.788	5.788	6.242	6.241	6.241	6.238	6.238		
3	Bantuan UEP untuk Fakir Miskin	4		840.000.000		840.000.000	140 KK							140						100,00	
						100,00										140					
4	Pemberdayaan dan Pemberian Bantuan kepada PMKS	4			423.366.900	420.066.500	1 Keg		1											100,00	
						99,22					1										
5	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	4			272.605.350	270.650.538	72 KK			40					32					100,00	
						99,28					40						32				

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET			
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
6	Pemberian Bantuan RS-RTLH	4		360.000.000		360.000.000	24 KK						24									100,00		
				100,00		100,00														24				
	TOTAL		26.166.590.000	1.200.000.000	695.972.250																			
	Total Realisasi Keuangan					27.338.347.038	Target/ Bulan	11,58	6,68	6,72	11,58	6,68	6,85	11,58	6,71	6,68	11,58	6,68	6,68					
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					98,36	Target Kumulatif	11,58	18,26	24,98	36,56	43,24	50,09	61,66	68,38	75,06	86,64	93,32	100,00					
	Total Realisasi s/d Desember 2019																			98,45				

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DPMG KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp./%)	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Dana Desa	2	897.201.400			369.468.104	90 gampong			5	10	10	5	10	10	10	10	10	10	21,11	Ketidaksesuaian realisasi fisik dan keuangan dikarenakan target fisik yang menargetkan 90 gampong tetapi pada pelaksanaan hanya 19 gampong yang merealisasikan
	TOTAL		897.201.400		-																
Total Realisasi Keuangan						369.468.104	Target/ Bulan	0,00	0,00	23,68	47,37	47,37	23,68	47,37	47,37	47,37	47,37	47,37	47,37		
Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan						41,18	Target Kumulatif	0,00	0,00	23,68	71,05	118,42	142,11	189,47	236,84	284,21	331,58	378,95	426,32		
Total Realisasi s/d Desember 2019																				21,11	

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS P3AP2KB KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	3			44.250.000	43.230.300	1 kali				1									100,00	
						97,70					1										
2	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam Mengelola Usaha	3			97.600.000	84.600.000	20 orang						20							100,00	
						86,68							20								
Total					141.850.000																
Total Realisasi Keuangan						127.830.300	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan						92,19	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2019																			100,00		

Lampiran 1

**LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3																			
	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan UKM	3			379.874.838	340.000.000	9 Kec				3			3		1				2	100,00
						89,50					3			3		1				2	
	Belanja Hibah Barang Atau Jasa (Bantuan Modal berupa barang	3			12.250.000.000	11.250.000.000	350 UKM					50	50	50	50	80	20	30	20		100,00
						91,84						50	50	50	50	80	20	30	20		
	TOTAL				12.629.874.838																
	Total Realisasi Keuangan					11.590.000.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,84	13,93	13,93	14,76	13,93	22,56	5,57	8,36	6,13		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					60,45	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	0,84	14,76	28,69	43,45	57,38	79,94	85,52	93,87	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2019																				100,00	

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DISNAKER KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Kluster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	3			1.559.500.000	1.555.530.000	18 paket bantuan				2	2	2	2	2	2	2	4		100,00	
						99,75				1	1	1	1	3	3	3	2	4	1		
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	4	1.388.720.000		496.874.650	1.853.091.500	506 org			48	108	48	48	92	80	50	32			100,00	
						98,28				48	108	48	48	92	80	50	32				
TOTAL			1.388.720.000		2.056.374.650																
Total Realisasi Keuangan						3.408.621.500	Target/ Bulan	-	-	9,51	20,91	9,51	9,51	17,87	15,59	9,89	6,46	0,76	-		
Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan						99,01	Target Kumulatif	-	-	9,51	30,42	39,92	49,43	67,30	82,89	92,78	99,24	100,00	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2019																			100,00		

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DINAS PERKIM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pengembangan Perumahan	4																			
	- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana Plus	4			3.828.500.000	3.821.340.000 99,81	31 unit							25		1		2	3	100,00	
	- Rehap Rumah Layak Huni	4			56.525.000	56.167.000 99,37	2 unit							2						100,00	
	- Peningkatan Kualitas Rumah	4			2.622.333.000	2.550.977.000 97,28	147 unit													147 97,28	Karena masyarakat tidak mampu lagi berswadaya
	Total				6.507.358.000																
	Total Realisasi Keuangan					6.428.484.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,56	0,00	1,11	83,33		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					98,82	Target Kumulatif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,56	15,56	16,67	100,00		
Total Realisasi s/d Desember 2019																				99,09	

Lampiran 1

LAPORAN BULANAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DP2KP KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019

Bulan Desember 2019

NO	RENCANA TINDAK (PROGRAM/KEGIATAN)	Klaster	SUMBER DANA			REALISASI KEUANGAN (Rp.)/%	TARGET 2019	RENCANA TINDAK/REALISASI												REALISASI FISIK (%)	KET
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS (Rp)	APBK (Rp)			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir																				
1	Pengadaan Palka Ikan Kec. Meuraxa	4			150.000.000	144.750.000	7 org			7										100,00	
						96,50										7					
2	Rumpon (Rumah Ikan)	4			200.000.000	198.600.000	7 org			7										100,00	
						99,30											7				
3	Bantuan Alat Kerja Bagi Nelayan Kuta alam	4			100.000.000	98.350.000	11 org				11									100,00	
						98,35									11						
4	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Jaring Ikan Kelompok Nelayan Bunot Gampong Alue Naga Kec. Syiah Kuala	4			75.000.000	74.250.000	52 org					52								100,00	
						99,00									52						
5	Pengadaan Mesin Boat 32 PK untuk Kelompok Nelayan Jasa Nelayan Gampong Deah Geulumpang Kec. Meuraxa	4			45.000.000	44.850.000	5 org					5								100,00	
						99,67											5				
	Total				570.000.000																
	Total Realisasi Keuangan					560.800.000	Target/ Bulan	0,00	0,00	17,07	13,41	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rata-rata Persentase Realisasi Keuangan					98,56	Target Kumulatif	0,00	0,00	17,07	30,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
								Total Realisasi s/d Desember 2019													100,00

**PERSENTASE REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	DISDIKBUD	1	15.681.000.000	15.628.500.000	99,31	100,00
2	BPKK	1	3.448.000.000	2.796.000.000	85,23	85,74
3	DINKES	1	1.200.000.000	1.138.900.000	94,91	100,00
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	10.547.984.000	9.121.321.500	88,83	86,37
5	DINSOS	1 dan 4	28.062.562.250	27.338.347.038	98,36	98,45
6	DPMG	2	897.201.400	369.468.104	41,18	21,11
7	DINAS P3AP2KB	3	141.850.000	127.830.300	92,19	100,00
8	DISKOP, UKM & DAG	3	12.629.874.838	11.590.000.000	60,45	100,00
9	DISNAKER	3 dan 4	3.445.094.650	3.408.621.500	99,01	100,00
10	DINAS PERKIM	4	6.507.358.000	6.428.484.000	98,82	99,09
11	DP2KP	4	570.000.000	560.800.000	98,56	100,00
TOTAL			83.130.925.138	78.508.272.442	86,99	90,07

**REKAP ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PER KLASTER TAHUN 2019**

No	Klaster	SKPD	Sumber Dana			Total Anggaran
			APBN (Rp)	APBA/ OTSUS	APBK (Rp)	
1	Klaster 1	Disdikbud, BPKK, Dinkes, Baitul Mal, Dinsos	30.334.790.000	11.512.800.000	11.066.184.000	52.913.774.000
2	Klaster 2	DPMG	897.201.400			897.201.400
3	Klaster 3	Baitul Mal, DP3AP2KB, Diskop, UKM & Dag, Disnaker			15.135.224.838	15.135.224.838
4	Klaster 4	Baitul Mal, Dinsos, Disnaker, Dinas Perkim, DP2KP	1.388.720.000	1.200.000.000	11.596.004.900	14.184.724.900
Total			32.620.711.400	12.712.800.000	37.797.413.738	83.130.925.138

**REKAPAN EVALUASI PER OPD
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

NO	SKPD	KLASTER	JUMLAH ANGGARAN APBN, APBA/OTSUS, APBK/ZIS (Rp)	JUMLAH KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK 100%	JUMLAH KEGIATAN REALISASI FISIK <100%	PERSENTASE REALISASI FISIK (%)	Keterangan
1	DISDIKBUD	1	15.681.000.000	4	4	0	100,00	
2	BPKK	1	3.448.000.000	2	0	2	85,74	Tidak melengkapi berkas, pindah & meninggal dunia
3	DINKES	1	1.200.000.000	1	1	0	100,00	
4	BAITUL MAL	1, 3 dan 4	10.547.984.000	13	2	11	86,37	1. Ada siswa/santri tidak melanjutkan pendidikan. 2. Tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan zakat. 3. Ada santri sudah berkeluarga. 4. dll
5	DINSOS	1 dan 4	28.062.562.250	6	4	2	98,45	1. Penyaluran PKH 4 tahap dihitung dan disalurkan oleh pusat, realisasinya sesuai dengan data PKH terupdate (terkini). 2. Data target setiap bulan nya telah ditetapkan dalam SK penerima BPNT untuk KPM Kota Banda Aceh, tetapi realisasinya mengalami pengurangan disebabkan oleh adanya beberapa KPM yang mengalami perubahan status seperti ekonomi telah mampu, meninggal, dan pindah domisili.
6	DPMG	2	897.201.400	1	0	1	21,11	Ketidak sesuaian realisasi fisik dan keuangan dikarenakan target fisik yang menargetkan 90 gampong tetapi pada pelaksanaan hanya 19 gampong yang merealisasikan
7	DINAS P3AP2KB	3	141.850.000	2	2	0	100,00	
8	DISKOP, UKM & DAG	3	12.629.874.838	2	2	0	100,00	
9	DISNAKER	3 dan 4	3.445.094.650	2	2	0	100,00	
10	DINAS PERKIM	4	6.507.358.000	3	2	1	99,09	Karena masyarakat tidak mampu lagi berswadaya
11	DP2KP	4	570.000.000	5	5	0	100,00	
	TOTAL		83.130.925.138	41	24	17	90,07	

Lampiran 2 Foto Rapat TKPK Tahun 2019











TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KOTA BANDA ACEH

Email : tkpkd.bandaaceh@gmail.com

Website : <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>